



PEMERINTAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA

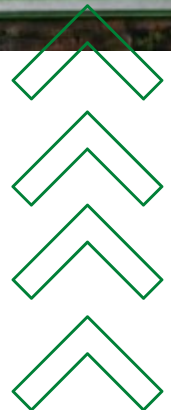


LAPORAN AKHIR

ANALISIS INTEGRASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA



KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA



LAPORAN AKHIR

**ANALISIS INTEGRASI PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**



**PEMERINTAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan karunia dan rahmat-Nya sehingga penyusunan laporan akhir “Analisis Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara 2017 - 2022 bahwa pemerintah daerah menerapkan sasaran program penurunan kemiskinan dengan strategi optimalisasi program penanggulangan kemiskinan pada peningkatan penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Analisis Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara disusun sebagai perangkat pedoman kerja pembangunan program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi antar SKPD terkait yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga dapat digunakan sebagai pedoman pembangunan dan kebijakan yang baik oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang turut serta membantu menyukseskan kegiatan analisis ini. Kami berharap dengan adanya laporan akhir Analisis Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat membantu pemerintah daerah dalam penyusunan prioritas, strategi, program dan kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan akhir Analisis Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat menjadi acuan bagi seluruh SKPD yang berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Hormat Kami,

Tim Penyusun

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan rencana aksi global, termasuk Indonesia dalam mengurangi kemiskinan, kesenjangan dan melindungi lingkungan. Salah satu kebijakan Sustainable Development Goals (SDG's) yang diterapkan di Indonesia dalam mengurangi kemiskinan adalah mengintegrasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan melalui Desa. Desa merupakan salah satu unit kelembagaan terkecil yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat di tingkat bawah sesuai dengan kondisi geografis dan lingkungan, tradisi dan budaya, dan pendapatan per kapita.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara 2017-2022, Pemerintah Daerah menerapkan sasaran program penurunan kemiskinan dengan strategi optimalisasi program penanggulangan kemiskinan pada peningkatan penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, penyediaan beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu, peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan perumahan masyarakat miskin, rumah tidak layak huni dan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan juga program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan.

Kajian integrasi program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara diperlukan sebagai salah satu upaya agar masing-masing SKPD dapat mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan yang ada sehingga mampu berjalan bersama-sama mencapai target dan kinerja RPJMD, yaitu penurunan angka kemiskinan sampai dengan 5,5 persen pada tahun 2022. Analisis integrasi program penanggulangan kemiskinan akan menggunakan beberapa pendekatan untuk menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan pertama menggunakan survei dengan analisis faktor untuk menjawab faktor-faktor kebutuhan program penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan secara terintegrasi antar SKPD. Metode kedua yang digunakan adalah adopsi parsial dari Participatory Action Research (PAR) yang merupakan metode yang tepat untuk mengatasi permasalahan sosial.

Penyusunan Analisis Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan perangkat pedoman kerja pembangunan program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi antar SKPD terkait di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dapat digunakan sebagai pedoman pembangunan dan kebijakan yang baik oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Selain itu dokumen ini dapat digunakan sebagai landasan perencanaan jangka pendek ataupun bahan acuan dalam penyusunan RPJMD yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Sasaran	4
1.5 Manfaat	4
1.6 Lingkup Pekerjaan	4
1.7 Luaran	5
1.8 Mekanisme Pelaksanaan Pekerjaan	5
BAB II KAJIAN LITERATUR	7
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN METODE	11
3.1 Desain Kajian	12
3.1.1 Metode Partisipatory Action Research (PAR)	12
3.1.2 Metode Analisis Faktor Eksploratory	14
3.1.3 Focuss Grup Discussion dan Wawancara	18
3.2 Obyek Kajian dan Waktu Kajian	20
3.3 Jenis, Sumber Data dan Alur Pelaksanaan	20
3.4 Metode Analisis	22
BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	23
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	28
5.1 Analisis Kondisi Exisiting Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara	28
5.2 Analisis Permasalahan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara	35
5.2.1 Tahap Perencanaan	35
5.2.2 Tahap Pelaksanaan	36
5.2.3 Tahap Monitoring dan Evaluasi	37
5.3 Analisis Faktor dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara	38
5.4 Pola Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara	44
5.5 Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi	47
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	51
6.1 Kesimpulan	51
6.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Model Kebijakan Perspektif Sistem Manajemen
- Gambar 3.2 Metode PAR
- Gambar 3.3 Desain Metodologi Penelitian
- Gambar 3.4 Alur Pelaksanaan
- Gambar 4.1 Laju PDRB (Harga Konstan) Tahun 2015-2021, dalam persen
- Gambar 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) HSU dan Kalimantan Selatan Tahun 2015- 2021
- Gambar 4.3 Persentase Penduduk Miskin (P0) HSU dan Kalimantan Selatan tahun 2015-2020
- Gambar 4.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) HSU dan Kalimantan Selatan tahun 2015-2020
- Gambar 4.5 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) HSU dan Kalimantan Selatan tahun 2015-2020
- Gambar 4.6 Koefisien Gini HSU dan Kalimantan Selatan tahun 2015-2021
- Gambar 4.7 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2015-2021
- Gambar 5.1 Program Penanggulangan Kemiskinan SKPD Eksisting
- Gambar 5.2 Wilayah Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan SKPD Eksisting
- Gambar 5.3 Keterkaitan antar SKPD dalam Program Penanggulangan Kemiskinan
- Gambar 5.4 Kelompok Sasaran Penerima Manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan
- Gambar 5.5 Jenis Kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan
- Gambar 5.6 Permasalahan dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan
- Gambar 5.7 Keterlibatan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan
- Gambar 5.8 Pola Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan
- Gambar 5.9 Tahap Pemutakhiran Data
- Gambar 5.10 Tahapan Penanggulangan Kemiskinan

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Tabel Signifikansi Factor Loading
Tabel 5.1	Peserta Focus Group Discussion Penyusunan Kajian Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tabel 5.2	Instrumen Penelitian
Tabel 5.3	Hasil Uji Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA)
Tabel 5.4	Total Variance Explained 50
Tabel 5.5	Rotasi Matrix Varimax 51
Tabel 5.5	Tahap dan Indikator Program Penanggulangan Kemiskinan 52
Tabel 5.6	Rencana Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

S*ustainable Development Goals (SDG's)* merupakan rencana aksi global, termasuk Indonesia dalam mengurangi kemiskinan, kesenjangan dan melindungi lingkungan. Tujuan SDG's adalah untuk menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan yang baik, pendidikan, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, industry dan inovasi, mengurangi ketimpangan, kota dan komunitas yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab, penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem laut, menjaga ekosistem darat, perdamaian dan kelembagaan yang kuat, kemitraan untuk mencapai tujuan, yang diharapkan tercapai pada tahun 2030. Salah satu kebijakan *Sustainable development goals (SDGs)* yang diterapkan di Indonesia dalam mengurangi kemiskinan adalah mengintegrasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan melalui desa. Desa merupakan salah satu unit kelembagaan terkecil yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat di tingkat bawah sesuai dengan kondisi geografis dan lingkungan, budaya, dan pendapatan perkapita.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Kepala Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mengembangkan perekonomian masyarakat desa dengan tujuan memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa. Secara khusus, melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah telah mengamanatkan bahwa SDGs desa merupakan upaya terpadu dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli Kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli Pendidikan, desa ramah perempuan, desa tanggap budaya dalam percepatan pencapaian tujuan SDGs.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sungai Hulu Utara 2017-2022, Pemerintah daerah menerapkan sasaran program penurunan kemiskinan dengan strategi optimalisasi program penanggulangan kemiskinan pada peningkatan penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, penyediaan beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu, peningkatan kuantitas dan

kualitas penyelenggaraan perumahan masyarakat miskin, rumah tidak layak huni dan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan juga program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan. Indikator keberhasilan dan kinerja dari pelaksanaan program Kabupaten Sungai Hulu Utara dalam penanggulangan kemiskinan adalah persentase penduduk miskin berada pada angka 5,96 persen pada tahun 2020 kemudian 5,73 persen pada tahun 2021 dan 5,5 persen pada tahun 2022.

Hasil data Badan Pusat Statistik tahun 2021 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin (P0) tahun 2020 sebesar 6,14 persen dan 6,83 persen pada tahun 2021, menunjukkan bahwa target kinerja penurunan kemiskinan Kabupaten Sungai Hulu Utara masih jauh dari kata memuaskan. Untuk itulah diperlukan kajian lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dengan membuat analisis penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi antar SKPD di Kabupaten Sungai Hulu Utara.

Kajian integrasi program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sungai Hulu Utara diperlukan sebagai salah satu upaya agar masing-masing SKPD dapat mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan yang ada sehingga mampu berjalan bersama-sama mencapai target dan kinerja RPJMD yaitu penurunan angka kemiskinan sampai dengan 5,5 persen pada tahun 2022. Analisis integrasi program penanggulangan kemiskinan akan menggunakan beberapa pendekatan untuk menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan pertama menggunakan survey dengan Analisis Faktor untuk menjawab faktor-faktor kebutuhan program penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan secara terintegrasi antar SKPD. Metode kedua yang digunakan adalah adopsi partial dari Participatory Action Research (PAR) yang merupakan metode yang tepat untuk mengatasi permasalahan social, dimana peneliti masuk kedalam masyarakat untuk mengetahui permasalahan secara langsung, mendapatkan data, menginterpretasikan hasil dan membuat rekomendasi tindakan. Dalam pelaksanaannya, analisis ini akan dimulai dengan mengetahui berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan SKPD terkait melalui focus grup discussion dan wawancara. Kemudian dilanjutkan dengan observasi lapangan untuk mengetahui permasalahan, dengan melakukan pemilihan berdasarkan purposive sampling desa dengan jumlah penduduk terbesar dan jumlah penduduk terkecil. Setelah itu dilakukan analisis untuk menginterpretasikan hasil dan membuat rekomendasi kepada Kabupaten

Sungai Hulu Utara. Untuk analisa *Participatory Action Research* (PAR) diadopsi secara sebagian sampai dengan tahapan interpretasi hasil, sedangkan untuk evaluasi pelaksanaan akan dilakukan dalam penelitian tahap berikutnya.

1.2 Maksud

Maksud penyusunan Analisis Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan perangkat pedoman kerja pembangunan program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi antar SKPD terkait di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dapat digunakan sebagai pedoman pembangunan dan kebijakan yang baik oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Secara eksplisit maksud penyusunan Analisis Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah:

- a. Sebagai salah satu dokumen landasan perencanaan jangka pendek yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017-2022;
- b. Sebagai salah satu dokumen yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan RPJMD yang akan datang;
- c. Sebagai acuan dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022.

1.3 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Analisis Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dan rujukan dalam menetapkan prioritas, strategi, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. Melakukan identifikasi kondisi dan permasalahan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- c. Menjadi tolak ukur dan proyeksi dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- d. Menyusun rekomendasi dan implementasi program penanggulangan kemiskinan dalam

bentuk rencana jangka pendek di Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- e. Menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pembangunan di bidang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.4 Sasaran

Sasaran dalam penyusunan Analisis Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

- a. Deskripsi tentang permasalahan dan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. Tersusunnya program integrasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- c. Tersusunnya dokumen penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.5 Manfaat

Manfaat dalam penyusunan Analisis Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi dokumen pedoman dan rujukan dalam menetapkan prioritas, strategi, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. Menjadi sumber dokumen kebijakan SKPD terkait dalam melakukan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.6 Lingkup Pekerjaan

Ruang Lingkup dalam penyusunan Analisis Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis *existing condition* tentang program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang

mencakup:

- i. Penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD
 - ii. Penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan pemerintah pusat dan provinsi
- b. Analisis tentang program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - c. Analisis tentang strategi integrasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara antar SKPD terkait;
 - d. Program prioritas penanggulangan kemiskinan lintas SKPD yang dapat diimplementasikan sebagai strategi jangka pendek dalam penanggulangan kemiskinan.

1.7 Keluaran

Keluaran dalam penyusunan Analisis Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

- a. Hasil analisis eksisting program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. Dokumen integrasi program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang meliputi kebijakan penanggulangan lintas SKPD, target dan indikator keberhasilan program;
- c. Dokumen kebijakan terkait dengan integrasi program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara lintas SKPD.

1.8 Mekanisme Pelaksanaan Pekerjaan

- a. Tahap persiapan, meliputi identifikasi awal dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, RPJMD, dan rencana kerja masing-masing SKPD;
- b. Tahap pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui beberapa tahapan:
 1. Studi dokumen;

2. Survei pengumpulan data dan observasi lapangan;
 3. *Focus Grup Discussion* (FGD) dan wawancara.
- c. Tahap analisis data. Merupakan tahapan dalam melakukan interpretasi hasil pengumpulan data dan memberikan rekomendasi terkait hasil analisis data
- d. Tahap finalisasi, yaitu tahap penyusunan hasil kegiatan berupa Analisis Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara

BAB II

KAJIAN LITERATUR

Secara global, kemiskinan masih menjadi tantangan besar bagi umat manusia. Permasalahan kemiskinan masih ditemukan pada banyak negara di dunia tetapi lebih umum di negara-negara berkembang. Maka dari itu upaya dalam mengidentifikasi penyebab kemiskinan dan pengembangan kebijakan untuk menurunkan kemiskinan tetap menjadi isu yang masih diperdebatkan. Hassan et al. (2020) berpendapat bahwa kemiskinan merupakan fenomena global yang mengindikasikan kurangnya kesejahteraan individu. Terdapat beberapa sudut pandang untuk mengidentifikasi variabel-variabel penyebab kemiskinan. Ozughalu & Ogwumike (2019) mengaitkan kemiskinan dengan karakteristik individu dan rumah tangga yang masih menjadi variabel-variabel yang sering diteliti sampai dengan saat ini. Selain karakteristik individu, terdapat variabel lain yang menjadi penyebab kemiskinan seperti pembangunan ekonomi, kondisi sosial, lingkungan ekologi, dan sebagainya (Alkire & Fang., 2019; Jiang et al., 2020).

Beberapa penelitian sebelumnya yang mengidentifikasi penyebab kemiskinan telah dilakukan dengan beberapa sudut pandang berbeda. Kim, *et al* (2016), Ma *et al* (2018), dan Wang *et al* (2021) menjelaskan penyebab kemiskinan melalui latar belakang geografis dari berbagai tingkatan. Penelitian tentang kemiskinan melalui latar belakang geografis yang dilakukan oleh Kim *et al.* (2016) membagi daerah menjadi beberapa tingkatan, yakni *states*, *villages*, *districts* dan *region*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *states* menyumbang persentase kemiskinan tertinggi dengan nilai 13%, sedangkan untuk *villages*, *districts* dan *region* masing-masing menyumbang 12%, 4%, dan 3%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya kemiskinan dikarenakan dua hal, yaitu efek individu dan efek latar belakang daerah. Efek individu, yaitu variabel terkait karakteristik individu, sedangkan efek latar belakang berarti efek kelompok yang mengacu pada lingkungan individu (Jiang *et al.*, 2020; Ma *et al.*, 2018).

Selaras dengan penelitian Kim *et al.* (2016), penelitian dengan berlatar belakang geografis juga dilakukan oleh Wang *et al.* (2021) namun dengan analisis berbeda. Menurut Wang *et al.* (2021) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan pada tingkatan

yang berbeda. Pada tingkat desa, jenis area desa, luas lahan pertanian per kapita, akses air minum, rasio angkatan kerja dan rasio penduduk terdaftar asuransi merupakan faktor penting penyebab kemiskinan di Desa. Dalam tingkat Kabupaten (*county*), tingkat pendapatan perkapita, angka partisipasi, rasio desa miskin merupakan faktor penyebab kemiskinan pada tingkat kabupaten (*county*). Penelitian terkait kemiskinan seringkali juga dibahas dalam dua perspektif, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah fenomena ekonomi yang mana individu atau rumah tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan primer atau dasar seperti makanan atau tempat tinggal (Liu *et al.*, 2017).

Sedangkan kemiskinan relatif adalah kondisi yang mana individu atau rumah tangga tidak mampu memperoleh kebutuhan yang tersedia bagi mayoritas masyarakat di daerah tersebut (Wang *et al.*, 2020). Wang *et al.* (2020) melakukan penelitian tentang penyebab kedua jenis kemiskinan tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor usia kepala rumah tangga, rasio ketergantungan, jumlah keluarga yang mengalami penyakit kronis, beban biaya pendidikan dan budaya kemiskinan berpengaruh signifikan pada munculnya kemiskinan absolut. Sedangkan faktor usia kepala rumah tangga, lahan pertanian, jumlah keluarga yang mengalami penyakit kronis, beban biaya pendidikan dan jarak ke pusat kota berpengaruh pada munculnya kemiskinan relatif.

Terlepas dari beberapa faktor tersebut di atas, terdapat penelitian lain yang mengidentifikasi penyebab kemiskinan seperti keterbatasan pemenuhan air, sanitasi dan bahan bakar (Jiao, 2020), kerentanan rumah tangga (Gloede *et al.*, 2015; Vo, 2018), tidak adanya privilege (Papadakis, 2020), wabah penyakit (Anser *et al.*, 2020), dan pendidikan (Heckman, 2018; Hofmarcher, 2021; Papadakis, 2020). Penelitian-penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa pendidikan masih menjadi faktor penting dalam mempengaruhi kemiskinan. Meskipun banyak literatur mengemukakan bagaimana pentingnya pendidikan untuk mengurangi risiko kemiskinan dan bagaimana pentingnya pendidikan bagi masyarakat miskin, terdapat pandangan lain terhadap hal ini. Silva-Laya *et al.* (2020) mengemukakan bahwa meskipun bersekolah, masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan tidak sepenuhnya memenuhi hak mereka atas pendidikan. Pencapaian mereka juga cenderung kurang dalam hal pendidikan, selain itu juga kualitas sekolah bagi mereka yang tidak memadai. Melihat hal tersebut, dibutuhkan koordinasi antar pihak untuk menjamin kondisi pendidikan bagi keluarga miskin, dan pada saat yang sama, kemajuan lembaga sekolah yang memenuhi

hak untuk belajar dan memperluas kemampuan masyarakat miskin dalam akses pendidikan berkualitas.

Selain itu, terdapat topik lain penyebab kemiskinan, yaitu ketimpangan pendapatan yang telah menjadi topik penelitian Fosu (2015) dan Adeleye *et al.* (2020). Kedua penelitian tersebut mengonfirmasi bahwa ketimpangan pendapatan akan memperburuk dan memperparah kemiskinan. Hal ini dikarenakan ketimpangan memiliki efek yang kompleks mulai menghambat pertumbuhan ekonomi hingga diskriminasi pada kaum sipil yang lemah. Dengan lebih rinci dan detail, Adeleye *et al.* (2020) melakukan penelitian tentang trilemma antara pertumbuhan-ketimpangan-kemiskinan. Hasilnya adalah ketimpangan pendapatan mengurangi dampak positif pertumbuhan ekonomi terhadap timbulnya kemiskinan. Dengan hal ini, menguatkan argumen bahwa ketimpangan memperbesar kemiskinan terlepas dari dampak positif pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini kembali menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan terbukti memiliki efek yang cukup besar terhadap kemiskinan.

Lebih jauh dari itu, kemiskinan juga dapat berlanjut ke generasi selanjutnya. Kemiskinan para “orangtua” menyebabkan efek berlanjut pada anak-anak mereka, yakni kemiskinan anak. Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan sebagai anak-anak yang kehilangan sumber daya materi dan sosial budaya yang saling terkait yang bersifat ekonomi, politik, sosial, budaya, fisik dan lingkungan dan umumnya diketahui penting bagi perkembangan anak (Ingutia *et al.*, 2020). Kemiskinan anak dipengaruhi oleh berbagai hal, Green *et al.* (2021) mengungkapkan bahwa variabel stabilitas, kualitas dan lingkungan rumah dinilai dapat mempengaruhi kemiskinan anak. Sedangkan menurut Ingutia *et al.* (2020) kemiskinan anak dipengaruhi oleh akses pendidikan, kualitas institusi, dan pendapatan orang tua. Ingutia *et al.* (2020) juga menemukan bahwa dengan pendapatan terbatas dari orang tua, membuat jumlah anak yang akan disekolahkan akan terbatas. Faktor budaya dan faktor sosial membuktikan bahwa orang tua lebih cenderung memilih anak laki-laki untuk bersekolah dibandingkan dengan anak perempuan. Ini membuat kesenjangan pendidikan dan pekerjaan antar *gender* di pasar tenaga kerja. Ini merupakan salah satu akar permasalahan dari tenaga kerja perempuan dan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang membutuhkan solusi tepat. Terdapat beberapa literatur yang mengidentifikasi faktor-faktor pengentas kemiskinan di berbagai daerah. Pertama, adalah perkembangan dan pembangunan sektor keuangan yang

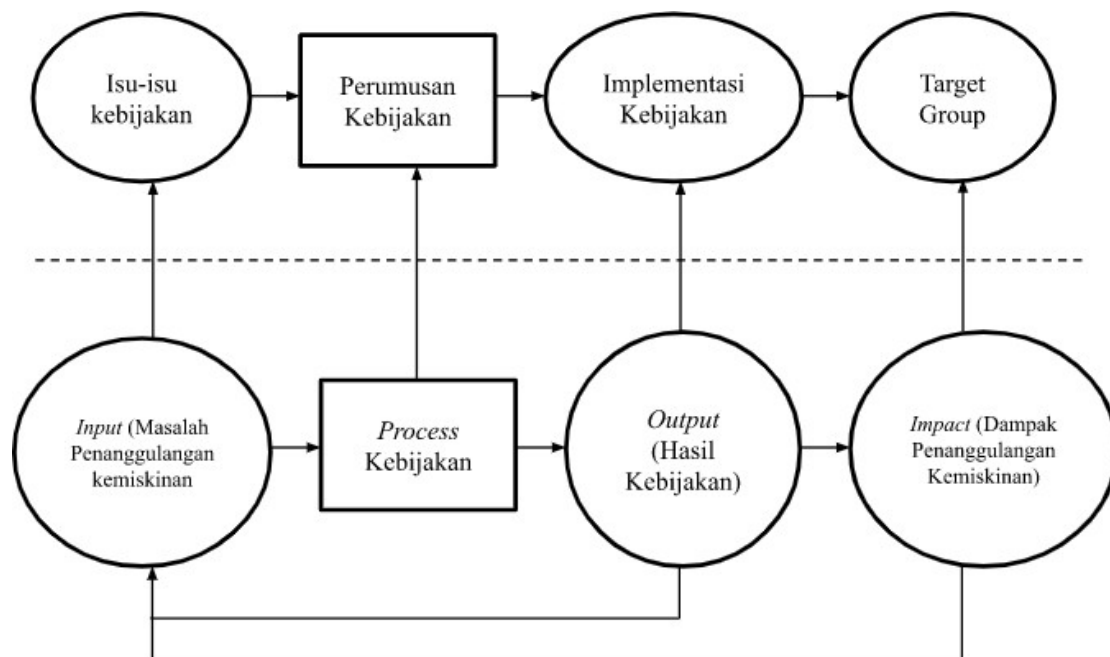
terbukti dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya akan memainkan peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di China (Ho & Lyke, 2018; Zameer *et al.*, 2020). Namun, dalam pelaksanaannya dibutuhkan kelembagaan yang baik untuk mendorong perkembangan sektor keuangan (*financial development*) dan menghapus kemiskinan (Kaidi *et al.*, 2019). Kedua, adalah dengan inovasi. Inovasi terbukti dapat menurunkan kemiskinan dalam beberapa bentuk inovasi. Penelitian Zameer *et al.* (2020) dan Han *et al.* (2021) di China menunjukkan bahwa inovasi teknologi sangat penting untuk efisiensi pengentasan kemiskinan. Inovasi dapat berbentuk apa saja tidak hanya dalam lingkup teknologi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Zhou *et al.* (2018) tentang bagaimana inovasi kebijakan lahan dapat mempengaruhi pengentasan kemiskinan di China. Zhou *et al.* (2018) berpendapat bahwa kesalahan-kesalahan dalam pembuatan kebijakan merupakan faktor utama dalam kemiskinan di pedesaan. Maka dari itu, dengan adanya inovasi kebijakan lahan dapat membantu masyarakat dalam menghadapi dilema tenaga kerja, modal dan lahan. Inovasi lainnya adalah inovasi kewirausahaan yang menjadi topik penelitian Nakara *et al.* (2021) di Perancis. Menurut Nakara *et al.* (2021) inovasi kewirausahaan dapat membantu mengentaskan kemiskinan, tetapi dalam memunculkan inovasi kewirausahaan dibutuhkan modal manusia, motivasi peluang, dan sumber daya keuangan, yang mana hal tersebut tidak dimiliki oleh semua orang.

Selain perkembangan sektor keuangan dan inovasi, faktor penyediaan infrastruktur juga terbukti dapat berpengaruh untuk mengentaskan kemiskinan. Penelitian Medeiros *et al.* (2021) di Brazil menunjukkan bahwa penyediaan infrastruktur yang merata sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan dalam akses sanitasi, internet, transportasi, telepon dan listrik dapat menurunkan kemiskinan. Tetapi harus diperhatikan juga kondisi dan ketimpangan antar daerah. Dari beberapa upaya-upaya dalam pengentasan kemiskinan, terdapat benang merah yang dapat disimpulkan bahwa pengentasan kemiskinan dapat dicapai dengan institusi atau kelembagaan yang efektif dan berkualitas.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual diperlukan untuk mengetahui alur pemikiran terhadap suatu konsep atau hubungan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif untuk mengetahui suatu fenomena. Dalam kajian integrasi program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara kerangka konseptual diperlukan sebagai langkah awal untuk menentukan kebijakan yang harus dilakukan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kajian ini berdasarkan perspektif kebijakan sistem manajemen yang dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini.



Gambar 3. 1 Model Kebijakan Perspektif Sistem Manajemen

1. Input adalah masalah program penanggulangan kemiskinan yang belum berjalan secara terintegrasi antar SKPD;
2. Process adalah upaya pemangku kepentingan antar SKPD yang mencoba mencari jalan keluar adanya masalah program penanggulangan kemiskinan. Beberapa model proses kebijakan publik dapat dipertimbangkan;

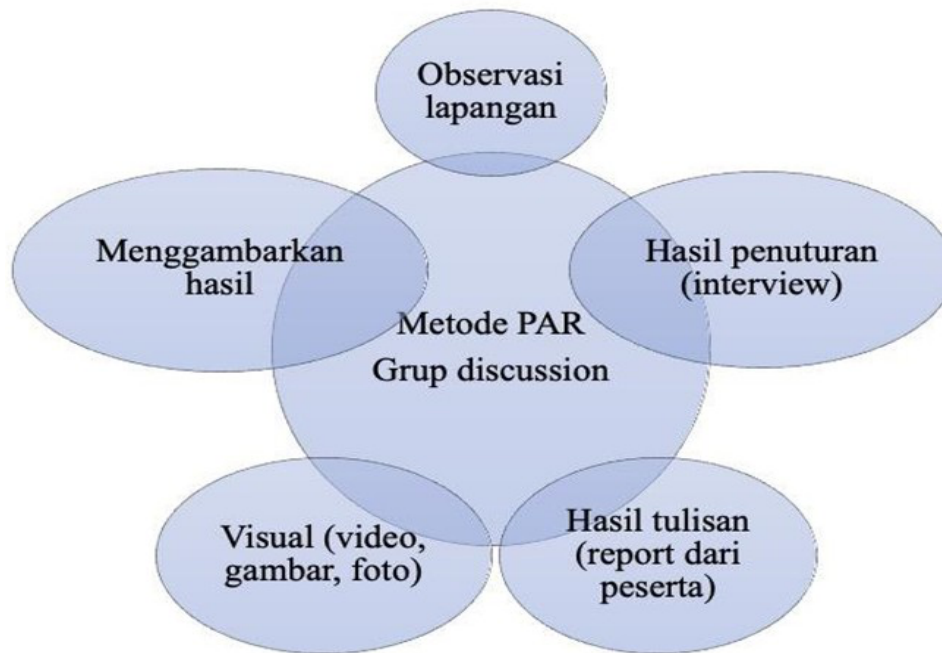
3. Output adalah terselenggaranya hasil dari proses kebijakan itu sendiri;
4. Impact adalah sebagai dampak kebijakan kepada masyarakat.

3.1 Desain Kajian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif-deskriptif dengan dua metode, yaitu analisis faktor dan *Participatory Action Research* (PAR). PAR merupakan metode yang tepat untuk mengatasi permasalahan sosial, dimana peneliti masuk ke dalam masyarakat untuk mengetahui permasalahan secara langsung, mendapatkan data, menginterpretasikan hasil dan membuat rekomendasi tindakan. PAR adalah metode penelitian tindakan yang merupakan bagian dari metodologi kualitatif untuk mendapatkan pemahaman tentang masalah sosial praktis. PAR mempertahankan komitmen pada praksis, gagasan teori dan praktik secara bersama-sama. Metode PAR merupakan metode kolaboratif dengan meringkai peneliti secara kolaboratif bersama partisipan.

3.1.1 Metode *Participatory Action Research* (PAR)

Langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi situasi yang membutuhkan perubahan, kemudian merencanakan proses penelitian untuk memfasilitasi “tindakan” yang relevan. Tahap selanjutnya dalam proses penelitian adalah refleksi. Baik peneliti dan peserta merefleksikan dan belajar dari interaksi dan dialog mereka yang berkelanjutan dan melanjutkan ke siklus penelitian baru, yang melibatkan tindakan dan refleksi lebih lanjut. Penekanan yang mendasari PAR adalah pada keterlibatan dialogis dengan rekan peneliti dan pengembangan strategi khusus konteks yang berorientasi pada berbagai tingkat pemberdayaan dan transformasi. Kunci untuk memfasilitasi keterlibatan dialogis adalah menjaga semangat kolaborasi yang berkelanjutan tetap aktif selama proses penelitian.



Gambar 3.3 Desain Metodologi Penelitian

Dalam kajian ini akan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Penyiapan Sosial**

Penyiapan sosial ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami masyarakat. Observasi lapangan merupakan tahapan awal dalam proses ini. Dalam proses ini peneliti berbaur dengan masyarakat untuk mengenali dan memahami masyarakat. Dengan melalui inkulturasi yang dibangun maka akan menciptakan komunikasi dengan masyarakat. Penyiapan tahap awal ini termasuk memahami kelompok peran yang tidak terorganisir dalam masyarakat, memahami peran dan fungsi Lembaga yang telah ada dan mengenali tradisi yang dilakukan masyarakat.

2. *Community Riset Social and Problem Diagnostic*

Proses ini merupakan menganalisis masalah yang ada di dalam masyarakat. Dengan mengetahui dan memahami keseharian partisipan, peneliti dapat mengidentifikasi masalah. Selain itu *focus grup discussion* (FGD) juga diperlukan untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang ada. Dalam proses ini dibuat pohon masalah, diagram alur, diagram venn dan analisis sosial.

3. *Planning*

Planning adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah dilakukan bersama masyarakat.

Dari pohon masalah yang di buat bersama masyarakat maka muncul pohon harapan yang berisikan harapan-harapan masyarakat dalam memecahkan masalah tersebut. Peneliti bersama masyarakat merencanakan program yang akan di laksanakan. Dengan membuat proposal dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait.

4. *Action*

Proses ini merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat berdasarkan pohon masalah yang dibuat bersama masyarakat dan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. *Action* ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan harapan masyarakat. Dalam membangun partisipasi masyarakat adalah partisipasi interaktif, dimana ide dalam berbagai kegiatan mulai perencanaan dan evaluasi melibatkan peran aktif masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat dapat mengambil inisiatif sendiri, melaksanakan kegiatan secara mandiri dan memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan dari masyarakat sendiri.

5. *Reflection*

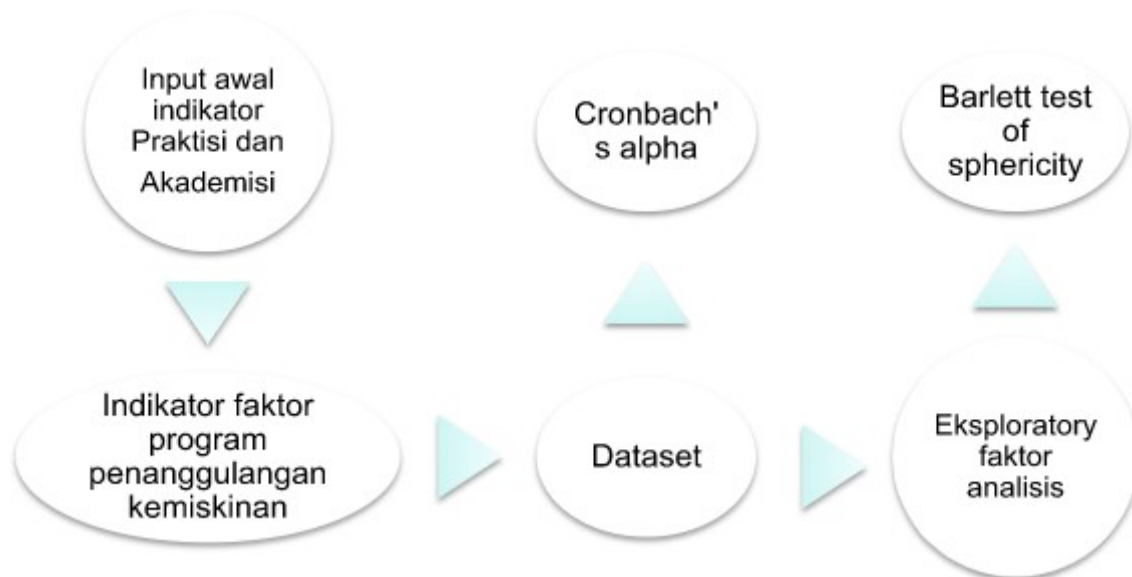
Yaitu tindakan dari hasil kegiatan atau menilai keberhasilan dan kekurangan semua komponen aktifitas terhadap perubahan sosial yang menjadi visi masyarakat. Pendamping merefleksi dan menganalisis dari hasil kegiatan yang telah di lakukan.

3.1.2 **Metode Analisis Faktor *Eksploratory***

Kajian ini menggunakan analisis faktor *eksploratory* untuk menentukan struktur yang mendasari antara variabel dalam analisis yang dapat digunakan untuk pengembangan dan validasi instrumen ataupun alat penilaian untuk mengukur konsep abstrak dengan teoritis atau praktis (Hair *et al.*, 2014; Swanson & Holton III, 2005). Analisis faktor mampu menjelaskan korelasi diantara variabel yang diamati dengan mengidentifikasi atau mengkonfirmasi faktor-faktor mendasar yang menjelaskan korelasi tersebut. Variabel yang diamati dapat berupa item tunggal pada instrumen survei atau nilai skala lainnya atau variabel yang diamati atau diukur akan menjadi item tunggal dari instrumen jenis survei dengan minimal tiga sampai lima variabel terukur per faktor umum untuk hasil yang akurat (Swanson & Holton III, 2005).

Instrumen yang digunakan termasuk uji validitas dan reliabilitas data akan digunakan dituliskan dalam bagian ini. Sampel awal yang digunakan dikumpulkan dari akademisi dan

penelitian terdahulu kemudian kuisioner akan disebarakan kepada Pemerintah Desa, masyarakat dan pelaku program penanggulangan kemiskinan. Penulis memastikan bahwa sampel homogen sesuai dengan struktur faktor yang digunakan. Untuk kuisioner dalam penelitian ini terdiri atas faktor-faktor tata kelola program penanggulangan kemiskinan yang diambil penulis berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Responden diminta untuk menentukan nilai kepentingan setiap faktor menggunakan skala likert. Setiap tanggapan akan dikategorikan pada masing-masing indikator faktor program penanggulangan kemiskinan. Untuk menguji validasi kumpulan data maka akan digunakan *Cronbach's alpha* sedangkan *Barlett test of sphericity* digunakan untuk menentukan kelayakan analisis faktor menguji seluruh matrik korelasi.



Gambar 3.3 Desain Metodologi Penelitian

a. Statistik reliabilitas dan kelayakan

Konsistensi data akan diukur menggunakan *cronbach's alpha*, yaitu untuk mengetahui korelasi dari dua test dalam mengukur efek yang sama Ketika subyek n mengikuti test secara konsisten pada k (Cronbach, 1951). Dimana S_i^2 adalah varians yang memiliki hubungan dengan i dan S_p^2 adalah varians yang memiliki hubungan nilai total observasi. Dengan tingkat kovarians yang tinggi, item tersebut mengukur konsep yang sama. Persamaan untuk mengukur *cronbach's alpha* adalah sebagai berikut.

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^k S_i^2}{S_p^2} \right)$$

Uji *Bartlett* menunjukkan apakah matrik korelasi adalah matrik identitas, sehingga dapat diperoleh fakta bahwa penggunaan model faktor tidak tepat. Persamaan untuk mengukur *Bartlett's test of sphericity* adalah sebagai berikut.

$$X^2 = - \left(W - 1 - \frac{2p+5}{6} \right) \log|R|$$

Pengukuran selanjutnya adalah *Measure of Sampling Adequacy* (MSA) yang digunakan untuk mengetahui apakah indikator tersebut dapat digunakan untuk analisis faktor. Nilai MSA berkisar antara 0 sampai dengan 1, apabila nilai MSA= 1 maka dapat disimpulkan bahwa variabel diprediksi dengan sempurna tanpa kesalahan variabel lain. Untuk nilai > 0,8 memberikan nilai, > 0,7 lumayan, > 0,6 biasa, > 0,5 kurang dan < 0,5 tidak dapat diterima (Hair *et al.*, 2014).

b. Faktor Sumbu Utama dan Rotasi

Faktor sumbu utama dilakukan untuk mengetahui pola dari dataset yang tidak mengikuti distribusi normal. Walaupun normalitas memberikan tingkat signifikansi yang tinggi pada faktor tetapi uji ini jarang dilakukan (Hair *et al.*, 2014). Matrik pada *loading factor* dengan *basis factor* m dapat dihitung sebagai berikut.

$$\Lambda_m = \Omega_m \Gamma_m^{\frac{1}{2}} \text{ dimana}$$

$$\Omega_m = \left(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_m \right) \text{ dan}$$

$\Gamma_m = \text{diag} \left(|Y_1|, |Y_2|, |Y_3|, \dots, |Y_m| \right)$ sehingga communality variable *i* akan n ditentukan oleh persamaan berikut ini.

$$h_i = \sum_{j=1}^m |Y_j| \omega_{ij}^2 \text{ sehingga loading factor akan ditentukan oleh persamaan berikut ini.}$$

$$\Lambda_{m(i)} = \Omega_{m(i)} \Gamma_{m(i)}^{\frac{1}{2}}$$

Kemudian untuk menginterpretasi hasil faktor sumbu utama, maka akan dilakukan rotasi. Menurut Hair *et al.*, (2014), metode rotasi dapat dipilih berdasarkan dua model, yaitu apabila faktor tersebut berkorelasi maka dapat menggunakan metode Oblique (oblimin, promax, orthoblique) atau apabila faktor tersebut tidak berkorelasi maka dapat digunakan metode orthogonal (varimax, equimax, quartimax).

c. Metode Estimasi

Dalam analisis faktor dapat digunakan *Principal Component Analysis* dan *Maximum Likelihood Estimator* untuk melakukan interpretasi dari analisis faktor (Johnson & Wichern, 2007). Apabila analisis faktor diasumsikan terdistribusi normal maka dapat digunakan *Maximum Likelihood Estimator* dengan *common factor* F dan faktor spesifik terdistribusi normal dan *maximum likelihood* dari faktor loading dan varian dapat diperoleh. Ketika Fp dan p secara bersama-sama terdistribusi normal maka rumus likelihood adalah sebagai berikut.

$$L(\mu, \Sigma) = (2\pi)^{-\frac{np}{2}} |\Sigma|^{-\frac{n}{2}} e^{-\left(\frac{1}{2}\right) \text{tr} \left[\Sigma^{-1} \left(\sum_{j=1}^n (X_j - \bar{X})(X_j - \bar{X})' + n(\bar{X} - \mu)(\bar{X} - \mu)' \right) \right]}$$

d. Interpretasi Faktor

Sesuai dengan Hair *et al.*, (2014) berikut ini adalah Langkah-langkah dalam melakukan interpretasi faktor, yaitu:

1. Matrik *factor loading*

Pada rotasi *orthogonal* akan menghasilkan dua matrik dari *factor loading* yang pertama adalah matrik pola yang mewakili setiap indikator untuk faktor, sedangkan yang kedua adalah matrik struktur faktor yang memiliki korelasi antara indikator dan faktor.

2. Identifikasi *factor loading* yang signifikan

Berikut ini adalah pedoman yang digunakan untuk mengukur signifikansi *factor loading*.

Table 3.1 Tabel Signifikansi Factor Loading

Factor Leading	Sampel yang dibutuhkan
0,30	350
0,35	250
0,40	200
0,45	150
0,50	120
0,55	100
0,60	85
	70
	60
	50

Sumber: Hair *et al.*, (2014)

3. Menghitung nilai *communality*
4. Melakukan kembali klasifikasi model faktor jika diperlukan

Setelah dilakukan identifikasi untuk *factor loading* yang signifikan, tetapi masih terdapat indikator yang tidak memiliki loading yang signifikan dan *communality*-nya terlalu rendah maka dapat menggunakan solusi evaluasi dari masing-masing variabel, melakukan rotasi alternatif, menambah atau mengurangi faktor, atau mengabaikan variabel yang bermasalah.

5. Memberi label faktor

Tahap terakhir yang dilakukan adalah memberikan penamaan faktor secara akurat sehingga setiap faktor akan berupa nama yang mewakili masing-masing faktor asal.

3.1.3 Focus Group Discussion (FGD) dan Wawancara

Penelitian kualitatif akan mampu memperdalam permasalahan dengan melakukan *focus group discussion* (FGD), wawancara mendalam dan studi lapangan dengan menginterpretasikan hasilnya. Studi lapangan akan mampu mengidentifikasi nilai sentral dalam obyek yang diwawancarai dengan menterjemahkannya dalam visi dan misi yang dapat berdampak pada mampu terjawabnya permasalahan utama di dalam program penanggulangan kemiskinan. Wawancara merupakan metode penelitian dengan memperoleh

data melalui persepsi dan pengalaman hidup individu dan memberikan fleksibilitas dalam pengumpulan dan analisis data (Bryman, 2011). Teknik wawancara terdiri dari dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara semi terstruktur. Wawancara terstruktur lebih ketat dan kaku karena peneliti berpedoman pada pertanyaan dan jawaban tertentu. Sedangkan wawancara semi terstruktur memiliki pedoman wawancara tetapi peneliti mampu mengeksplorasi jawaban narasumber sesuai dengan kebutuhan penelitian (Bryman, 2011; Cresswell, 2013; Haniffa & Hudaib, 2006). Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, maka akan dilakukan wawancara semi terstruktur terkait dengan konsep yang telah ditentukan untuk mendekati konstruksi yang cukup mendekati kepada narasumber utama (Fassin *et al.*, 2011; Pérez-Elizundia *et al.*, 2020).

Protokol dan panduan wawancara akan diikuti untuk melakukan wawancara semi terstruktur untuk memastikan validitas dan realibilitas data. Walaupun tidak ada *test* untuk mengukur validitas dan realibilitas data, tetapi menurut (Bryman, 2011) validitas dan reliabilitas sangat penting bagi penelitian kualitatif. Validitas merupakan hasil interpretasi hasil untuk mencerminkan fenomena. Cara untuk melakukan validitas hasil wawancara dilakukan dengan mengembangkan panduan wawancara, perekaman dan transkripsi dengan triangulasi (Yin, 2011).

Focus group discussion (FGD) merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan informasi secara grup dengan peserta yang heterogen dengan jumlah peserta grup delapan sampai sepuluh peserta. FGD ini merupakan tahap awal untuk mengetahui permasalahan dari pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh SKPD terkait di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3.2 Obyek Kajian dan Waktu Kajian

PAR menekankan partisipasi penuh dari obyek penelitian untuk memunculkan solusi atas masalah yang ingin dipecahkan. Kajian ini dilakukan pada bulan April 2022 sampai bulan Agustus 2022. Dalam kajian ini, peneliti membagi obyek kajian sesuai dengan tahap analisis PAR menjadi:

1. Obyek Pertama

Tahap awal yang dilakukan dalam kajian ini adalah melakukan *group discussion* untuk mengetahui tentang permasalahan dan kebijakan program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam *group discussion* tahap pertama ini, peneliti menghadirkan SKPD terkait meliputi Bappedalitbang, DPMD, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM, Sekda, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman. Dalam *group discussion* tahap awal membahas tentang bagaimana program penanggulangan kemiskinan masing-masing SKPD dan mengetahui daerah mana yang kurang berhasil dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara.

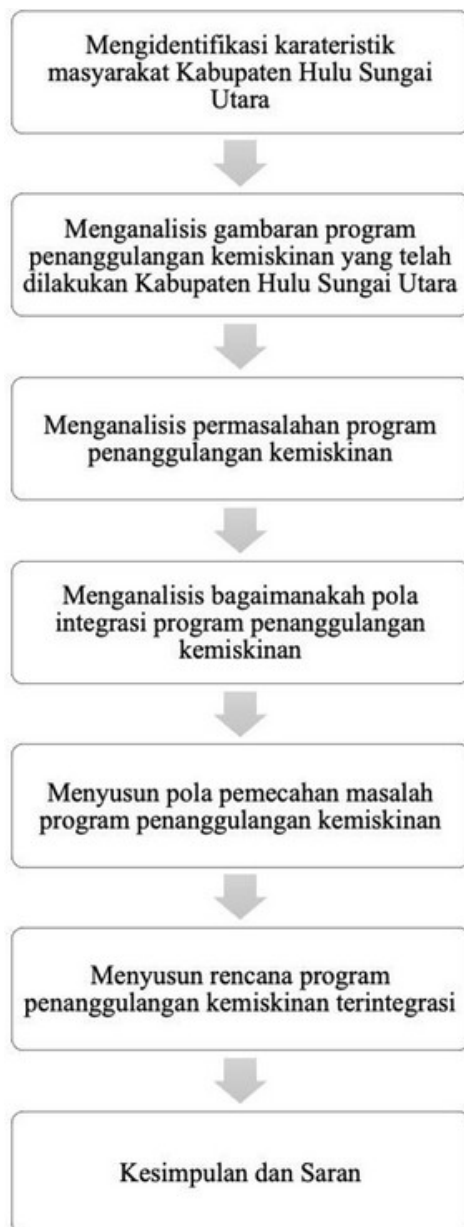
2. Obyek Kedua

Tahap kedua dalam kajian ini adalah melakukan PAR pada satu wilayah yang kurang berhasil dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Observasi lapangan dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program di daerah tersebut. Setelah dilakukan observasi maka dilakukan *group discussion* untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dengan mengundang beberapa tokoh masyarakat, pemerintah desa, BPD dan lembaga terkait. Untuk menguatkan hasil dapat ditambahkan dengan interview pada masyarakat.

3.3 Jenis, Sumber Data dan Alur Pelaksanaan

Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari *Focus Group Discussion*, interviu dan survei, sedangkan data sekunder didapatkan dari website dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder dan

laporan pemerintah, yaitu berupa data karakteristik masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara, gambaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, penduduk Hulu Sungai Utara, angka kemiskinan, angka pengangguran dan jenis pekerjaan, jumlah fasilitas kesehatan, jumlah fasilitas umum, jumlah penerima bantuan pemerintah, data ibu hamil dan menyusui, data lansia, data disabilitas, dan data kader pemberdayaan masyarakat. Selain itu, data primer juga dapat ditinjau dari hasil *focus group discussion* dan interview terkait dengan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Sedangkan Alur Pelaksanaan adalah sebagai berikut:



Gambar 3.4 Alur Pelaksanaan

3.4 Pengolahan dan Analisis Data

Data diolah dan dianalisis secara deskriptif dengan melihat frekuensi setiap data untuk kemudian dianalisis dengan didukung teori yang ada. Hasil analisis data akan digunakan sebagai dasar pembuat kebijakan dengan menyesuaikan kebijakan publik yang telah dilakukan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Hulu Sungai Utara (HSU) merupakan salah satu kabupaten yang berada di selatan Pulau Kalimantan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi kabupaten ini melebihi PDRB provinsi serta PDB nasional pada beberapa tahun dalam tujuh tahun terakhir seperti yang digambarkan pada grafik 1. Bahkan dalam beberapa tahun, laju pertumbuhannya hampir mencapai 6% yang mana sangat sulit dicapai dalam skala nasional. Dalam tahun 2020 pun yakni dalam kondisi pandemi, dampak yang dirasakan lebih kecil dibandingkan dengan skala provinsi Kalimantan Selatan maupun Indonesia. Meskipun dalam pemulihannya yakni pada tahun 2021, tidak secepat skala provinsi maupun skala nasional.



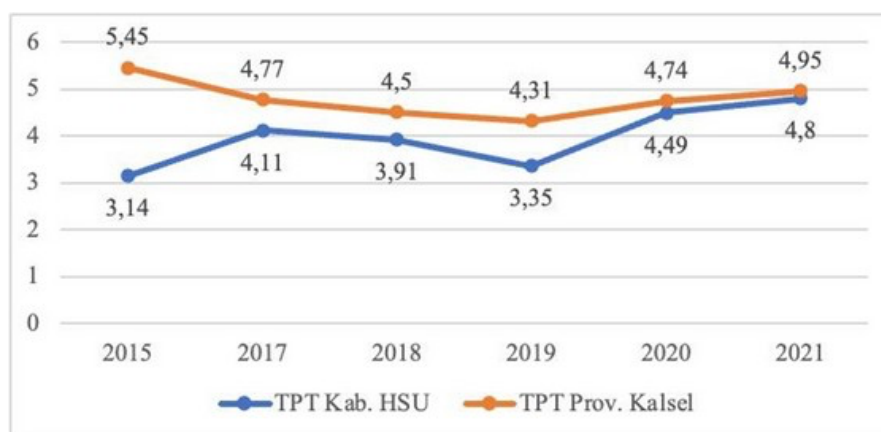
Gambar 4.1. Laju PDRB (Harga Konstan) Tahun 2015-2021, dalam persen
Sumber: BPS, diolah

Kabupaten ini ditopang oleh tiga sektor ekonomi yakni pertanian, perdagangan dan administrasi pemerintahan. Ketiga industri ini menyumbang PDRB dengan persentase masing-masing 16.9%, 14.55% dan 12.59% pada tahun 2020. Pertanian masih menjadi sektor ekonomi sebagai penyumbang PDRB tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sektor pertanian tidak hanya menjadi tulang punggung dalam lingkup HSU saja, tetapi juga menjadi penyumbang PDRB tertinggi kedua dalam lingkup provinsi Kalimantan Selatan, hanya kalah dengan sektor pertambangan. Komoditas utamanya adalah ubi jalar, ubi kayu dan cabai mengungguli produksi komoditas padi dan jagung.

Selain menyumbang PDRB tertinggi, sektor pertanian juga banyak menyerap tenaga

kerja pada Kabupaten HSU. Tingginya nilai PDRB sektor pertanian pada Kabupaten SHU tidak lepas dari banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Dalam 2017-2020 persentase tenaga kerja di HSU yang bekerja pada sektor pertanian berkisar antara 24%-31%. Angka tersebut berada di bawah pekerjaan sektor jasa seperti perdagangan; angkutan dan pergudangan; keuangan dan jasa perusahaan; dan jasa kemasyarakatan. Pekerja sektor pertanian di HSU mayoritas berpusat di pedesaan. Persentase penduduk yang bekerja pada sektor pertanian mencapai 48,18%.

Dalam hal pengangguran, Kabupaten HSU tidak mengalami permasalahan berarti tentang hal ini. Dari grafik 4 dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cenderung rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan pada beberapa tahun terakhir. TPT sendiri merupakan tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja.

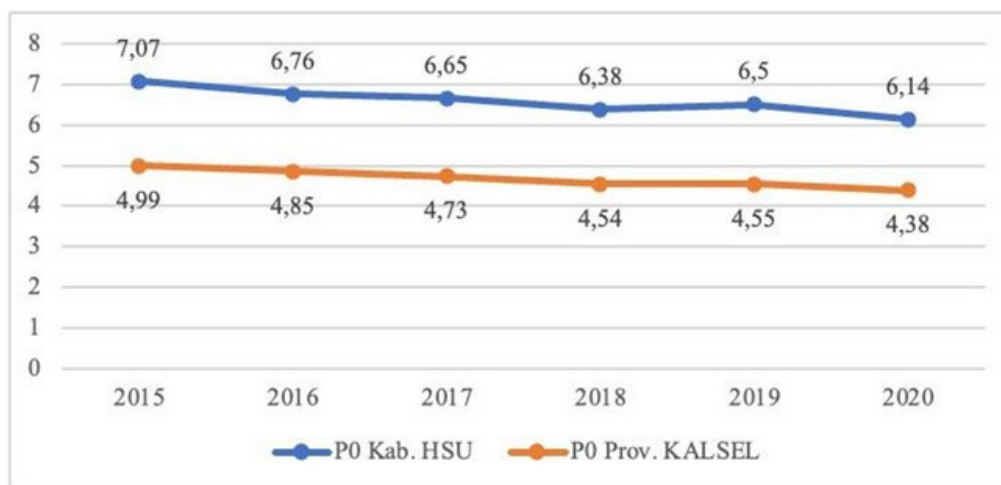


Gambar 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) HSU dan Kalimantan Selatan Tahun 2015-2021

*Untuk data tahun 2016, data hanya tersedia sampai level provinsi

Terdapat satu permasalahan lagi yang menjadi permasalahan Kabupaten Hulu Sungai Utara yakni kemiskinan. Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Hulu Sungai Utara menduduki peringkat pertama dalam hal tingkat persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan. Jika dibandingkan dengan tingkat persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten HSU masih unggul dengan selisih cukup tinggi yakni hingga 2% seperti yang tergambar pada Grafik 5. Bahkan persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah mencapai angka 5%. Tingginya nilai persentase penduduk

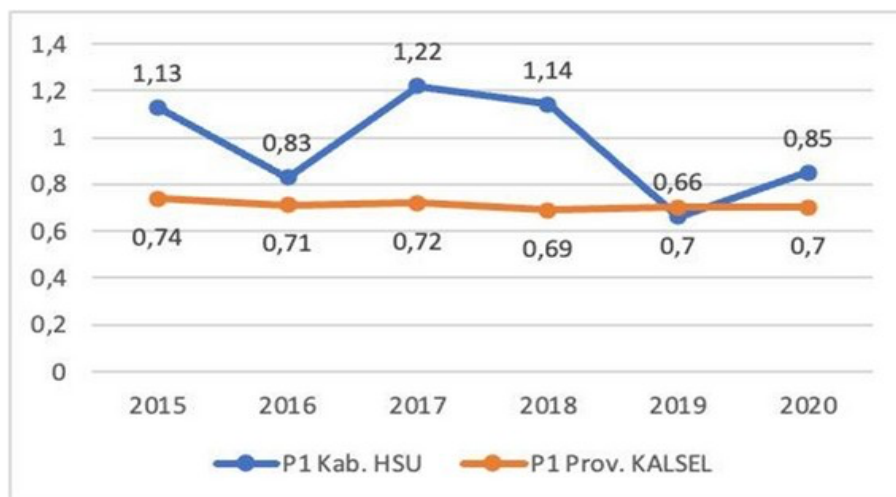
miskin Kabupaten HSU ini dapat dikarenakan banyak hal, seperti pendidikan, pertumbuhan ekonomi daerah dan sebagainya.



Gambar 4.3 Persentase Penduduk Miskin (P0) HSU dan Kalimantan Selatan Tahun 2015-2020

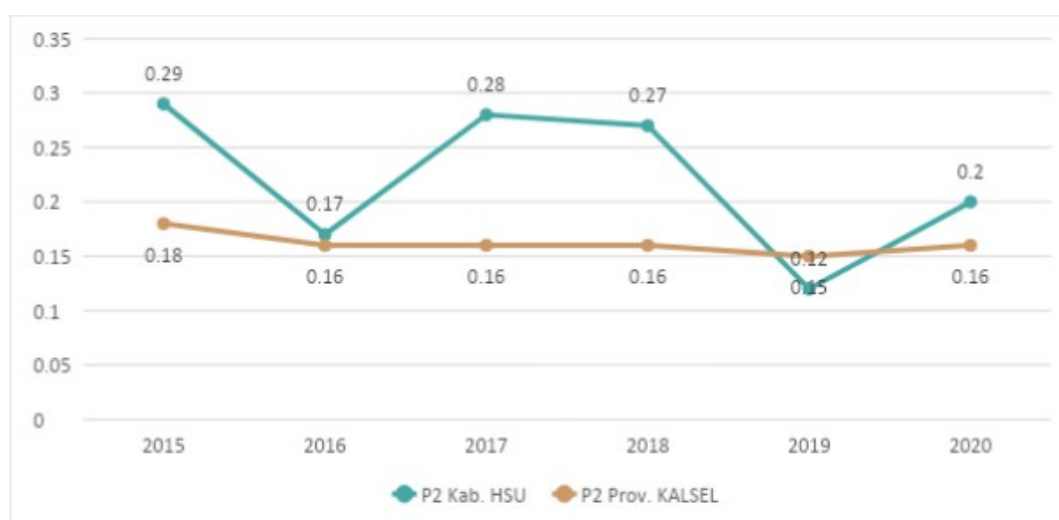
Sumber: BPS, data diolah

Perbedaan yang signifikan tidak hanya terjadi pada persentase penduduk miskin (P0) saja, tetapi juga pada indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten HSU. Seperti pada gambar 4.7 dan 4.8, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan HSU mengungguli indeks Provinsi Kalimantan Selatan. Nilai P1 dan P2 Kabupaten HSU cenderung tinggi dan fluktuatif, berbeda dengan nilai P1 dan P2 Provinsi Kalimantan Selatan yang cenderung stabil. Meskipun pada tahun 2019-2020 nilai P1 dan P2 sudah mendekati Provinsi, nilai P1 dan P2 Kabupaten HSU masih melebihi nilai Provinsi Kalimantan Selatan, dan harus menjadi perhatian khusus karena permasalahan kemiskinan memang masih menjadi permasalahan Kabupaten HSU tiap tahunnya.



Gambar 4.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) HSU dan Kalimantan Selatan Tahun 2015-2020

Sumber: BPS, data diolah

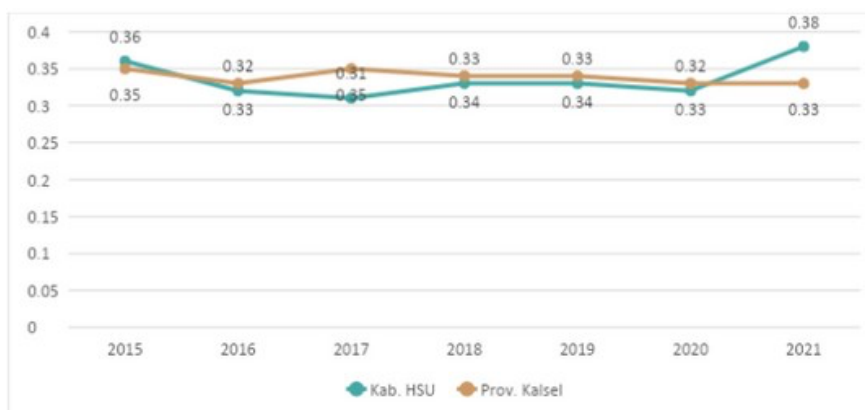


Gambar 4.5 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) HSU dan Kalimantan Selatan Tahun 2015-2020

Sumber: BPS, data diolah

Terdapat banyak sekali variabel yang mempengaruhi kemiskinan, salah satunya adalah ketimpangan pendapatan. Menurut Fosu (2015) ketimpangan pendapatan dapat memperburuk kemiskinan. Temuan Adeleye *et al.* (2020) juga mengonfirmasi hal ini. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa perlunya mengurangi ketimpangan pendapatan sebagai upaya untuk menghindari kondisi kemiskinan yang semakin buruk. Dengan tingginya kemiskinan pada Kabupaten HSU, pemerintah perlu menjaga tingkat kesetaraan untuk menghindari kondisi yang telah disebutkan di atas. Hal ini nampaknya sudah terjadi di

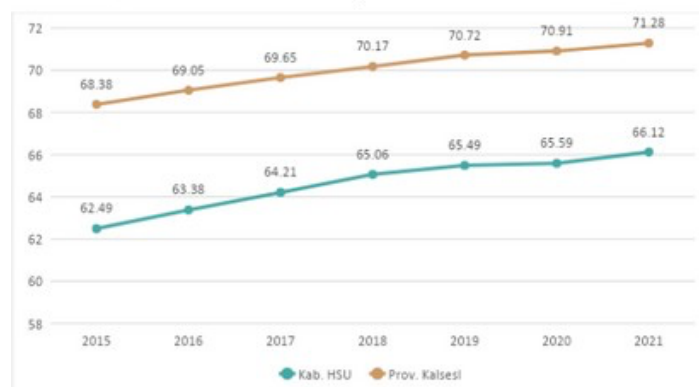
Kabupaten HSU yang menunjukkan bahwa nilai koefisien Gini tidak terlalu tinggi dan dapat dibilang masih dalam batas normal.



Gambar 4.6 Koefisien Gini HSU dan Kalimantan Selatan Tahun 2015-2021

Sumber: BPS, data diolah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan dalam mengukur pencapaian suatu negara atau daerah dalam tiga aspek dasar pembangunan manusia yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup. Dari data yang dihimpun dari BPS seperti yang digambarkan pada grafik 4.10 dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten HSU masih berada di bawah Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, meskipun demikian terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Ini merupakan perkembangan yang penting bagi Kabupaten HSU. Dengan adanya hasil-hasil ini, maka diperlukan penguatan pada ketiga aspek dasar pembangunan manusia (kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak) untuk terus meningkatkan IPM dan lebih mendekati IPM Provinsi Kalimantan Selatan.



Gambar 4.7 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2015-2021

Sumber: BPS, data diolah

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Kondisi Eksisting Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Analisis awal yang dilakukan dalam menyusun Kajian Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah melakukan identifikasi awal terkait dengan program eksisting yang telah dilaksanakan oleh SKPD terkait dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD). FGD merupakan salah satu cara untuk mengetahui secara mendalam permasalahan dasar dan program yang telah dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. FGD awal dilakukan pada 30 Juni 2022 menggunakan media zoom meeting karena keterbatasan waktu dan kondisi pandemic Covid-19 yang masih belum memungkinkan dilakukan interaksi secara langsung. FGD ini diikuti oleh berbagai SKPD terkait dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1 Peserta Focus Group Discussion Penyusunan Kajian Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jabatan
1	Bappeda Litbang	Perencana Kabid. Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
2	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Kesra Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kepala Bagian Pemerintahan
3	Dinas Perikanan	Plt. Kasubag Program dan Data
4	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kepala Bidang Perdagangan Kepala Bidang Perindustrian Kepala Bidang UKM
5	Dinas Sosial	Plt. Kepala Dinas
6	Dinas Pertanian	Sekretaris Dinas
7	Dinas Ketahanan Pangan	Plt. Kepala Dinas
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Kepala Dinas
9	Dinas Kesehatan	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
10	Dinas Pekerjaan Umum	Kepala Dinas
11	Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPPA)	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
12	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Fungsional Bangunan dan Perumahan

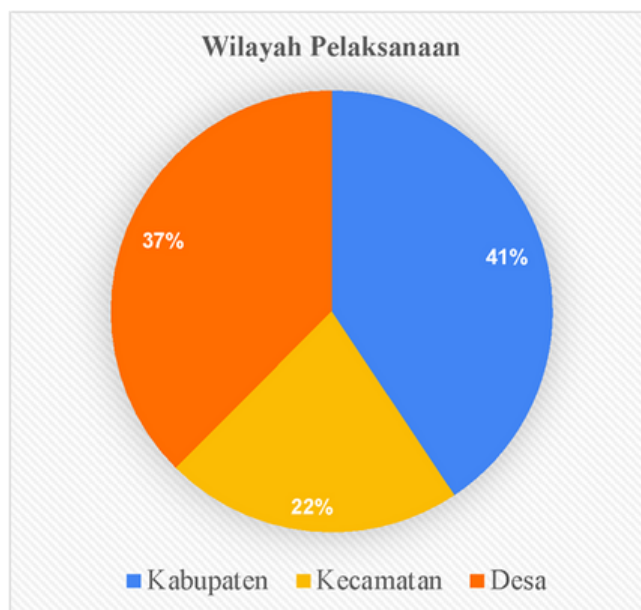
Pada tahap awal diskusi grup, dilakukan identifikasi apakah terdapat program penanggulangan kemiskinan di masing-masing SKPD dan bagaimana proses pelaksanaan program tersebut. Hasil diskusi tersebut menunjukkan bahwa sebesar 63 persen dari total SKPD yang hadir memiliki program penanggulangan kemiskinan sedangkan sisanya tidak memiliki program tersebut. Pendanaan program penanggulangan kemiskinan tersebut sepenuhnya berasal dari anggaran Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.



Gambar 5.1 Program Penanggulangan Kemiskinan SKPD Existing

Sumber: data primer, diolah

Hampir sebagian besar masing-masing SKPD memiliki program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan dengan anggaran pemerintah, tetapi tidak terdapat program penanggulangan kemiskinan SKPD yang bekerja sama dengan pihak ketiga, misalnya perusahaan. Wilayah pelaksanaan untuk program tersebut juga telah dilakukan secara merata, Sebagian besar sebesar 41 persen dilaksanakan di tingkat Kabupaten, 37 persen dilaksanakan di tingkat Kecamatan dan sisanya 22 persen dilaksanakan di tingkat Desa.



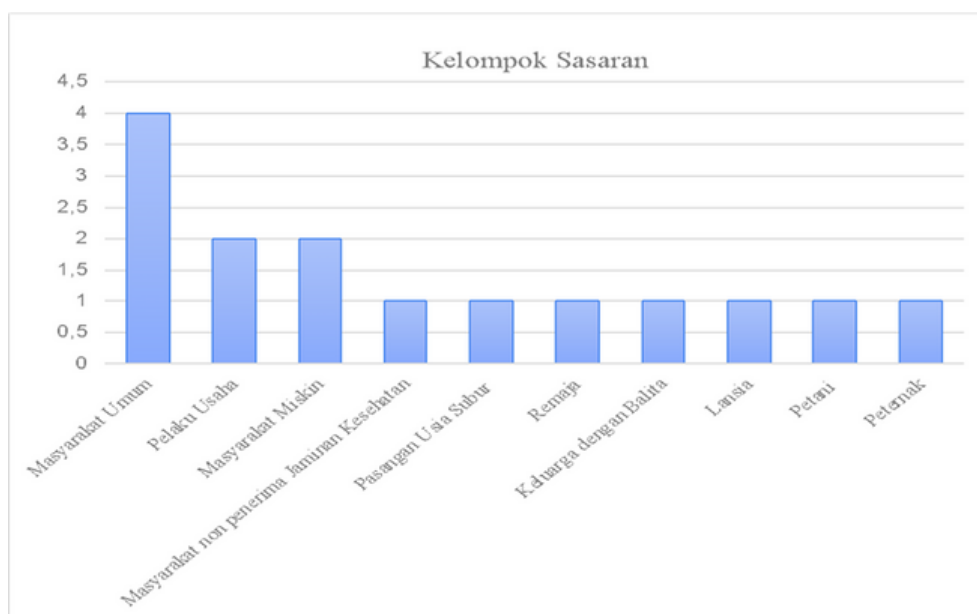
Gambar 5.2 Wilayah Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan SKPD Eksisting
 Sumber: data primer, diolah

Beberapa program penanggulangan kemiskinan telah melibatkan antar SKPD lain tetapi tidak semuanya terlibat. Gambar 5.3 di bawah ini menunjukkan beberapa SKPD yang memiliki program penanggulangan kemiskinan dengan keterkaitan dengan SKPD lainnya. Program penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh Bappeda Litbang bekerja sama dengan Dinas Sosial, begitu pula dengan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan selain melibatkan Dinas Sosial juga melibatkan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melibatkan Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan programnya.



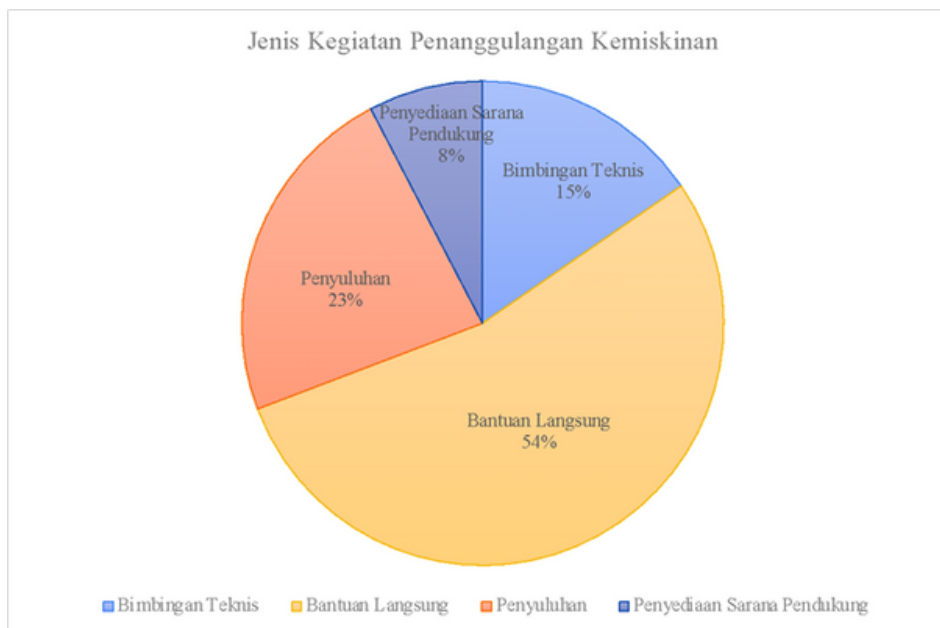
Gambar 5.3 Keterkaitan antar SKPD dalam Program Penanggulangan Kemiskinan
 Sumber: data primer, diolah

Sasaran penerima manfaat dari program penanggulangan kemiskinan tersebut bervariasi sesuai dengan ketentuan masing-masing SKPD. Penerima manfaat terbesar adalah masyarakat umum, kemudian pelaku usaha dan masyarakat miskin. Penerima manfaat masyarakat umum ini dapat dikategorikan secara luas, tidak secara khusus memiliki kategori dan kriteria tertentu sebagai penerima bantuan/program penanggulangan kemiskinan.



Gambar 5.4 Kelompok Sasaran Penerima Manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan
Sumber: data primer, diolah

Program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan tersebut memiliki berbagai jenis kegiatan diantaranya sebesar 54 persen adalah bantuan langsung. Bantuan langsung ini merupakan pemberian bantuan yang diberikan langsung kepada penerima manfaat seperti hibah pada kelompok tani/peternak, keluarga penerima manfaat, keluarga yang belum memiliki pelayanan kesehatan ataupun penerima bantuan pemugaran rumah. Kegiatan berikutnya yang dilaksanakan adalah penyuluhan sebesar 23 persen yang dilakukan pada remaja, pasangan keluarga dan usaha kecil. Bimbingan teknis yang dilakukan oleh SKPD terkait berjumlah 15 persen, sedangkan sisanya adalah penyediaan sarana pendukung sebesar 8 persen yang dilakukan pada usaha kecil dalam melakukan pemasaran. Hasil tersebut dapat dilihat dalam gambar 5.5 berikut ini.

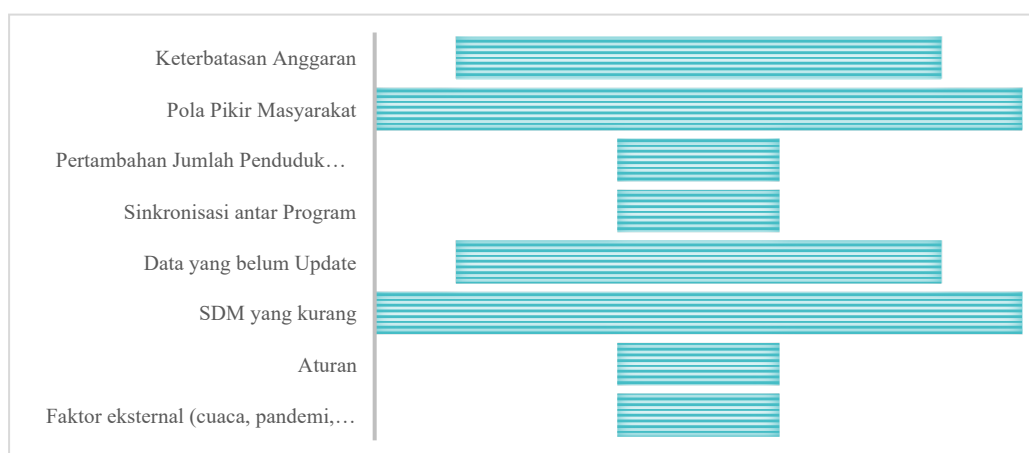


Gambar 5.5 Jenis Kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan

Sumber: data primer, diolah

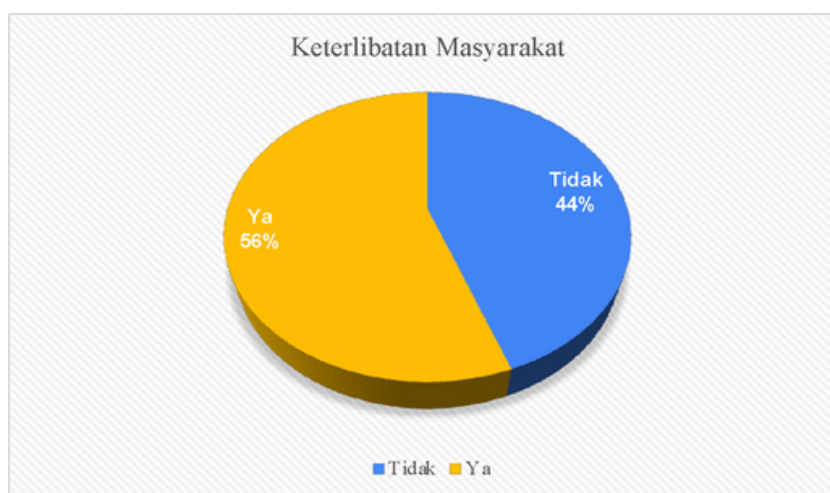
Walaupun program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak dan penerima manfaat, tetapi hasil FGD menunjukkan bahwa banyak terjadi permasalahan dalam pelaksanaan program-program tersebut. Permasalahan dari sisi penerima manfaat atau subyek penerima program penanggulangan kemiskinan menjadi permasalahan utama bagi SKPD, terutama pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa program yang diberikan merupakan bantuan dan akan selalu ada tanpa penerima manfaat berusaha. Selain itu, kurangnya sumber daya merupakan permasalahan lain yang dianggap paling berat bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Sumber daya subyek penerima yang terbatas juga menjadikan penerima manfaat tidak mampu mengembangkan ide dan kreatifitas terutama ketika program yang diberikan adalah peningkatan kemampuan dan ketrampilan. Keterbatasan anggaran yang diberikan juga dirasakan memberikan dampak atas pelaksanaan program, sehingga program tidak mampu berjalan secara maksimal.

Sejalan dengan anggaran, data penerima manfaat yang tidak update menjadikan kendala tersendiri bagi SKPD, selain hal tersebut membuat pelaksanaan program tidak tepat pada sasaran penerima manfaat. Permasalahan lain yang terjadi adalah penambahan jumlah penduduk miskin, aturan masing-masing program yang berbeda dan keterbatasan aturan, sinkronisasi antar program yang dilaksanakan agar tidak terjadi tumpang tindih antar kegiatan dan faktor eksternal yang menjadi *force majeure* seperti cuaca, bencana alam ataupun pandemi. Ringkasan permasalahan yang terjadi dapat dilihat dalam gambar 5.6 berikut ini.



Gambar 5.6 Permasalahan dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan
 Sumber: data primer, diolah

Program penanggulangan yang telah dilakukan juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Walaupun hanya sebesar 58 persen dalam program SKPD ini yang melibatkan masyarakat hal tersebut cukup penting bagi pelaksanaan program. Gambar 5.7 menunjukkan perbedaan keterlibatan masyarakat dalam program tersebut.



Gambar 5.7 Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan
 Sumber: data primer, diolah

Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan bersama dengan SKPD pelaksana program penanggulangan kemiskinan, tahap berikutnya adalah melakukan identifikasi secara langsung terkait program penanggulangan kemiskinan di yang telah dilaksanakan. Dengan mengambil salah satu sampel desa, maka akan dilakukan wawancara secara mendalam terkait dengan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang telah diterima ataupun sedang dilakukan oleh Pemerintah.

Setelah dilakukan FGD, maka perlu dilakukan interview mendalam terhadap masyarakat terkait dengan program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan. Interview dilakukan pada masyarakat dengan kriteria bahwa pelaku program, mengetahui pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ataupun terlibat kegiatan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Provinsi. Setelah dilakukan wawancara hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa selama ini yang berperan dalam menentukan penerima manfaat di dominasi oleh pengurus RT/RW setempat karena dianggap paling memahamiarganya.

‘....selama ini untuk BLT dana desa misalnya yang menentukan penerimanya dari kami, karena setiap hari kami yang mengetahui warga yang kesusahan. Biasanya warga kami memang tidak dalam kategori tidak memiliki pekerjaan, tetapi memiliki pekerjaan serabutan ataupun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya...’ (N1)

Selain itu, anggaran yang digunakan juga sangat terbatas apabila terdapat wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, tetapi berbeda dengan wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang cukup kecil maka berapapun dana yang diberikan juga akan mencukupi. Permasalahan tersebut juga telah disampaikan oleh beberapa narasumber pada saat interview.

‘....permasalahan yang kami alami selama ini adalah warga kami yang cukup banyak diantara RT lainnya, sehingga jumlah anggaran yang diberikan kadang tidak mencukupi untuk semua warga yang kekurangan, kalau seperti hal tersebut maka kami harap apabila ada wilayah lain yang warganya sedikit bisa dialihkan ke kami, tetapi secara aturan kan memang tidak bisa...’ (N1) ‘....selama ini warga mendapat porsi yang cukup untuk program kemiskinan, karena disini jumlah KK-nya cukup sedikit sehingga bantuan bisa dibagikan dengan baik...’ (N2)

Selain permasalahan anggaran yang kurang terdistribusi secara merata, kesadaran masyarakat dalam mengikuti program yang dilaksanakan Pemerintah juga cukup baik. Salah satu warga menyatakan bahwa dia mengikuti kegiatan pelatihan pembuatan gazebo yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi atas inisiatif pribadi dengan melakukan pendaftaran pada instansi terkait. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran warga masyarakat dalam ikut serta untuk mengentaskan kemiskinan juga cukup besar, yang harus diimbangi dengan sosialisasi dari instansi terkait program-program yang dilaksanakan.

‘...saya ikut program ini dengan mendaftar secara mandiri di web dinas perindustrian provinsi, pelaksanaan pelatihan ini enam bulan dengan berbagai kegiatan...’ (N2)

5.2 Analisis Permasalahan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara oleh masing-masing SKPD sesuai dengan aturan dan penerima manfaat yang telah ditetapkan. Sumber pendanaan program tersebut adalah anggaran Pemerintah Pusat atau APBN dan anggaran Pemerintah Daerah atau APBD. Hasil *focus group discussion* tersebut tidak menunjukkan adanya Kerjasama atau pihak ketiga lain yang terlibat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Walaupun telah dilaksanakan oleh sebagian besar SKPD di Kabupaten Hulu Sungai Utara, tetapi setiap tahun terdapat kenaikan jumlah penduduk miskin sehingga perubahan indeks kemiskinan turun secara lambat. Bahkan menurut data Badan Pusat Statistik (2022), pada tahun 2020 persentase penduduk miskin Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah 6,14 naik 0,69 menjadi 6,83 pada tahun 2021. Beberapa faktor penyebab permasalahan program penanggulangan kemiskinan dapat dirangkum sebagai berikut.

5.2.1 Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap awal sebuah program. Tahap perencanaan meliputi identifikasi sasaran penerima manfaat, partisipasi masyarakat dan jumlah anggaran kegiatan. Masing-masing permasalahan yang terjadi dalam tahap ini dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Identifikasi sasaran penerima manfaat, merupakan salah satu tahap terpenting dalam menentukan penerima manfaat dari program penanggulangan kemiskinan. Pada hasil FGD diketahui bahwa data penerima manfaat diperoleh dari data masing-masing SKPD yang melaksanakan program kegiatan penanggulangan kemiskinan. Perbedaan data

tersebut dapat menjadikan adanya *double* pendanaan pada pelaksanaan program ataupun penerima manfaat yang seharusnya menerima tidak masuk dalam data tersebut. Data penerima manfaat sangat penting bagi pelaksanaan program, sehingga data yang terpusat akan memudahkan dalam identifikasi sasaran penerima manfaat. Selain itu, perlu dikategorikan penerima manfaat sesuai klasifikasi tingkat kemiskinan agar SKPD dapat memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.

- b. Partisipasi masyarakat, merupakan bentuk keterlibatan masyarakat terutama masyarakat penerima manfaat dalam mengetahui program yang akan dilaksanakan. Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi terhadap program yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Partisipasi masyarakat atas usulan-usulan tersebut dapat diakomodir dalam Musrenbang Desa sehingga dapat memunculkan permasalahan utama di dalam masyarakat untuk segera ditindaklanjuti. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk perencanaan *bottom up* yang menjadikan masyarakat bukan hanya sebagai obyek penerima program tetapi juga bertindak sebagai subyek yang memberikan kontribusi dalam bentuk usulan kegiatan.
- c. Anggaran kegiatan, merupakan salah satu faktor kegiatan berjalan dengan lancar dan baik. Ketersediaan anggaran baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan menjadikan program berjalan dengan lancar dan mampu menjangkau sasaran dengan tepat dan lebih luas. Realisasi anggaran juga merupakan salah satu indikator kinerja program penanggulangan kemiskinan berjalan dengan baik dengan terserapnya anggaran sesuai dengan rencana kegiatan dan waktu pelaksanaan.

5.2.2 Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahap kedua setelah proses perencanaan program. Tahap pelaksanaan terbagi menjadi dua, yaitu pelaksanaan sesuai dengan aturan dalam skala nasional untuk program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah Pusat dan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah/SKPD pelaksana program. Untuk pelaksanaan dari pemerintah Pusat, data penerima manfaat divalidasi oleh pendamping sosial yang telah ditentukan kemudian dilaksanakan kegiatan. Sedangkan untuk program yang

berada di dalam SKPD, proses pelaksanaan berdasarkan pada permohonan proposal dari masyarakat/penerima manfaat kemudian dilakukan validasi dan dilaksanakan kegiatan. Untuk SKPD dengan pelayanan kesehatan, bagi masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan termasuk kategori masyarakat miskin maka dapat membawa persyaratan administratif untuk mendapatkan pelayanan.

Sedangkan untuk pelaksanaan program dengan sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia sedikit berbeda dalam pelaksanaannya. SKPD menentukan sasaran penerima manfaat berdasarkan data yang dimiliki oleh masing-masing SKPD kemudian melakukan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis ataupun penyuluhan. Selain itu, terdapat program yang memfasilitasi lokasi bagi usaha kecil untuk memasarkan produknya di tingkat kecamatan. Permasalahan yang sering terjadi dalam tahap pelaksanaan ini adalah *double funding* penerima manfaat yang telah menerima bantuan dari program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah, sehingga masyarakat lain yang seharusnya layak menjadi penerima manfaat tidak masuk menjadi bagian dari penerima manfaat program.

5.2.3 Tahap Monitoring dan Evaluasi

Tahap monitoring dan evaluasi menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan program. Evaluasi dapat dilaksanakan selama dua kali dalam satu tahun, yaitu pada tengah periode dan pada akhir tahun anggaran. Untuk program penanggulangan kemiskinan yang berada di bawah pemerintah Pusat, maka sistem monitoring dan evaluasi akan mengikuti aturan dari Pemerintah Pusat atau Kementerian terkait yang menaunginya. Tetapi, apabila program penanggulangan kemiskinan tersebut bersumber dari Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah dapat membuat sistem monitoring dan evaluasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sistem monitoring yang baik juga mengakomodir kebutuhan sistem *whistleblowing*. Sistem *whistleblowing* ini dapat disosialisasikan pada masyarakat melalui pemerintah Desa ataupun Badan Permusyawaratan Desa. Sistem *whistleblowing* ini dapat berupa pengaduan secara langsung melalui media sosial (instagram, web, dan media resmi SKPD terkait) ataupun *call center*. Sistem *whistleblowing* ini akan mengurangi adanya kecurangan ataupun penyalahgunaan dana pada pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

5.3 Analisis Faktor dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sebelum tahap perencanaan program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu dipetakan terlebih dahulu faktor apa saja yang dirasakan cukup penting bagi sebuah pelaksanaan program. Untuk mengukur konsep yang sesuai maka dalam kajian ini menggunakan analisis faktor. Analisis faktor *eksploratory* digunakan untuk menentukan struktur yang mendasari antara variabel dalam analisis yang dapat digunakan untuk pengembangan dan validasi instrumen ataupun alat penilaian untuk mengukur konsep abstrak dengan teoritis atau praktis (Hair *et al.*, 2014; Swanson & Holton III, 2005). Analisis faktor mampu menjelaskan korelasi diantara variabel yang diamati dengan mengidentifikasi atau mengkonfirmasi faktor-faktor mendasar yang menjelaskan korelasi tersebut. Variabel yang diamati dapat berupa item tunggal pada instrumen survei atau nilai skala lainnya atau variabel yang diamati atau diukur akan menjadi item tunggal dari instrumen jenis survei dengan minimal tiga sampai lima variabel terukur per faktor umum untuk hasil yang akurat (Swanson & Holton III, 2005).

Instrumen yang digunakan termasuk uji validitas dan reliabilitas data akan digunakan dituliskan dalam bagian ini. Sampel awal yang digunakan dikumpulkan dari Kepala Desa, perangkat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat umum. Penulis memastikan bahwa sampel homogen sesuai dengan struktur faktor yang digunakan. Untuk Kuisioner dalam kajian ini terdiri indikator kinerja desa pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 6 tahun 2014 Tentang Desa. Responden diminta untuk menentukan nilai kepentingan setiap faktor menggunakan skala likert. Setiap tanggapan akan dikategorikan pada masing-masing indikator. Untuk menguji validasi kumpulan data maka akan digunakan *Cronbach's alpha* sedangkan *Barlett test of sphericity* digunakan untuk menentukan kelayakan analisis faktor menguji seluruh matrik korelasi.

Tabel 5.2 Instrumen Penelitian

Faktor	
Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Musyawarah desa merupakan bentuk kepercayaan kepada pemerintah desa ▪ Tim pelaksana kegiatan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ▪ Musyawarah desa memilih tim pelaksana kegiatan ▪ Masyarakat dapat melakukan pengawasan program secara langsung ▪ Usulan kegiatan merupakan hasil musyawarah bersama
Transparan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tambahan pengetahuan baru bagi masyarakat ▪ Musyawarah desa merupakan forum untuk mengetahui perencanaan di desa ▪ Aturan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dipahami dengan jelas oleh masyarakat
Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Musyawarah desa meningkatkan partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan ▪ Adanya keterwakilan usulan masyarakat ▪ Masyarakat dapat ikut serta aktif dalam kegiatan
Inklusif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterlibatan perempuan juga mendapatkan peran ▪ Kelompok perempuan mendapatkan undangan untuk mengikuti musyawarah desa ▪ Kelompok perempuan mendapatkan porsi sebagai tim pelaksana kegiatan ▪ Adanya keterlibatan masyarakat miskin, kaum perempuan dan kelompok difabilitas ▪ Terdapat kegiatan yang memenuhi kebutuhan kelompok difabilitas
Independen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Usulan bukan merupakan usulan kelompok tertentu ▪ Pendamping kegiatan di tingkat desa memiliki peran aktif ▪ Prioritas kegiatan hasil musyawarah desa merupakan usulan masyarakat

Untuk mengetahui metode yang dapat mereduksi variabel menjadi variabel baru maka dapat digunakan Analisis faktor. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, maka dengan menggunakan Uji Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA) dilakukan uji untuk mengukur tingkat korelasi antar variabel. Hasil uji KMO MSA dapat dilihat pada tabel 5.3 di bawah ini.

Tabel 5.3 Hasil Uji Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA)

KMO and Bartlett's Test	
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	.627
Bartlett's Test of Sphericity	.568.907*

*sig. pada 0,01

Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa nilai KMO adalah 0,627 yang menunjukkan bahwa nilai $> 0,50$ sehingga dapat dilakukan analisis faktor. Dari hasil *Barlett's test of sphericity* juga dapat diketahui bahwa korelasi variabel cukup besar untuk analisis faktor. Setelah mengetahui korelasi antar variabel maka akan dilanjutkan dengan ekstraksi faktor yang mereduksi indikator-indikator dalam faktor di atas dengan menggunakan *Eigenvalues*. *Eigenvalues* merupakan pendekatan untuk menentukan jumlah faktor yang akan digunakan dalam kajian. Nilai *eigenvalues* yang dipertahankan dalam faktor merupakan nilai yang lebih besar dari 1 sehingga dapat digunakan dalam analisis. Tabel 5.4 di bawah merangkum hasil tersebut.

Kemudian, dari hasil nilai *eigenvalues* menunjukkan bahwa dari masing-masing indikator tersebut telah dikelompokkan menjadi empat faktor dengan nilai *eigenvalues* > 1 . Untuk mengetahui interpretasi masing-masing faktor maka digunakan metode varimax sebagai pendekatan analitik untuk mendapatkan rotasi orthogonal suatu faktor. Hasil rotasi dengan metode varimax dapat dilihat pada table 5.5 di bawah pada halaman berikutnya.

Tabel 5.4 Total Variance Explained

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% Variance	of Cumulative %	Total	% Variance	of Cumulative %	Total	% Variance	of Cumulative %
1	9.677	48.386	48.386	9.677	48.386	48.386	5.085	25.427	25.427
2	2.537	12.685	61.071	2.537	12.685	61.071	4.477	22.383	47.810
3	1.606	8.029	69.100	1.606	8.029	69.100	4.133	20.667	68.477
4	1.215	6.074	75.174	1.215	6.074	75.174	1.339	6.697	75.174
5	.956	4.781	79.955						
6	.803	4.017	83.971						
7	.691	3.455	87.426						
8	.590	2.952	90.378						
9	.363	1.817	92.195						
10	.320	1.598	93.793						
11	.265	1.324	95.117						
12	.230	1.149	96.265						
13	.194	.968	97.234						
14	.160	.798	98.032						
15	.152	.762	98.793						
16	.104	.522	99.315						
17	.067	.333	99.649						
18	.042	.210	99.858						
19	.026	.128	99.986						
20	.003	.014	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Tabel 5.5 Rotasi Matrix Varimax
Rotated Component Matrix^a

	Component			
	1	2	3	4
Akuntabilitas_1	.425	.427	.468	-.120
Akuntabilitas_2	.630	.503	.159	-.239
Akuntabilitas_3	.593	.175	.639	.145
Akuntabilitas_4	.444	.561	.189	-.113
Akuntabilitas_5	.735	.263	.235	-.023
Transparan_1	.758	.237	.061	.295
Transparan_2	.808	.158	.274	.042
Transparan_3	.151	-.032	.873	.184
Partisipatif_1	.823	.142	.313	-.089
Partisipatif_2	.488	.182	.730	-.147
Partisipatif_3	.310	.276	.800	.030
Partisipatif_4	.713	.589	.163	-.012
Inklusif_1	.526	.664	-.091	-.126
Inklusif_2	.293	.754	.017	-.188
Inklusif_3	-.130	.763	.349	.141
Inklusif_4	.372	.758	.003	.136
Inklusif_5	.225	.761	.301	.344
Independen_1	.023	.006	.150	.907
Independen_2	.002	.068	.830	.125
Independen_3	.282	.563	.564	-.188

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 8 iterations.

Dari hasil rotasi varimax tersebut dapat diketahui bahwa indikator masing-masing faktor hanya mengelompok menjadi empat komponen. Indikator akuntabilitas pada komponen 1, indikator transparan pada komponen 4, indikator partisipatif pada komponen 2 dan indikator inklusif pada komponen 2 dan indikator independen pada komponen 3. Berdasarkan analisis faktor tersebut maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat memasukkan indikator berikut ini untuk menjadi dasar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang mengakomodir dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan.

Tabel 5.6 Tahap dan Indikator Program Penanggulangan Kemiskinan

Tahap	Indikator	
Perencanaan	Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> Musyawarah desa merupakan bentuk kepercayaan kepada pemerintah desa
	Transparan	<ul style="list-style-type: none"> Musyawarah desa memilih tim pelaksana kegiatan
	Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> Usulan kegiatan merupakan hasil musyawarah Bersama
	Independen	<ul style="list-style-type: none"> Tambahan pengetahuan baru bagi masyarakat Musyawarah desa merupakan forum untuk mengetahui perencanaan di desa Aturan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dipahami dengan jelas oleh masyarakat Kelompok perempuan mendapatkan undangan untuk mengikuti musyawarah desa Kelompok perempuan mendapatkan porsi sebagai tim pelaksana kegiatan Adanya keterlibatan masyarakat miskin, kaum perempuan dan kelompok difabilitas Usulan bukan merupakan usulan kelompok tertentu Prioritas kegiatan hasil musyawarah desa merupakan usulan masyarakat Adanya sosialisasi sistim pengaduan permasalahan dengan sistem whistleblowing
Pelaksanaan	Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> Pendamping kegiatan di tingkat desa memiliki peran aktif
	Transparan	<ul style="list-style-type: none"> Tim pelaksana kegiatan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
	Partisipatif	
	Independen	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat kegiatan yang memenuhi kebutuhan kelompok difabilitas

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aturan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dipahami dengan jelas oleh masyarakat ▪ Keterlibatan perempuan juga mendapatkan peran ▪ Adanya keterlibatan masyarakat miskin, kaum perempuan dan kelompok difabilitas ▪ Adanya sosialisasi sistim pengaduan permasalahan dengan sistem whistleblowing
Monitoring/Pengawasan	Akuntabilitas Transparan Partisipatif Independen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat dapat melakukan pengawasan program secara langsung ▪ Aturan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dipahami dengan jelas oleh masyarakat ▪ Adanya sosialisasi sistim pengaduan permasalahan dengan sistem whistleblowing

Tabel 5.6 di atas merangkum indikator dasar yang dapat digunakan untuk membuat sebuah program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain itu, indikator tersebut juga dapat dimasukkan sebagai indikator capaian dan keberhasilan sebuah program dengan memberikan komposisi persentase pada masing-masing komponen. Tercapainya indikator tersebut sangat penting dilakukan sebagai salah satu ukuran keberhasilan program penanggulangan kemiskinan

5.4. Pola Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Setelah diketahui indikator yang dibutuhkan dalam program penanggulangan kemiskinan maka tahap berikutnya adalah melakukan pola integrasi antar SKPD di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan program tersebut. Keterlibatan antar SKPD ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi penerima manfaat yang tidak terakomodir dan dapat dilaksanakan tepat sasaran. Dalam pola integrasi, koordinasi utama dapat dilakukan oleh Bappeda Litbang sebagai salah satu SKPD pelaksana perencanaan pembangunan daerah. Pola ini diambil berdasarkan hasil FGD yang bisa dikembangkan sesuai dengan jumlah SKPD di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk lebih memudahkan mengetahui pola integrasi, maka dapat dilihat pada gambar 5.8 berikut ini.



Gambar 5.8 Pola Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan

Pola integrasi awal yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

a. Keterkaitan Seluruh SKPD pada Bappeda Litbang, Dinas Sosial, Dinas PMD dan Sekretariat Daerah

Bappeda Litbang dan Dinas Sosial memiliki fungsi yang penting dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sebagai sentral atau pusat informasi dan data. Bappeda Litbang dapat melakukan perencanaan dan melakukan koordinasi antar SKPD sehingga program dapat berjalan secara efektif. Kemudian Dinas sosial berperan sebagai sentral data yang digunakan sebagai penerima manfaat dari masing-masing SKPD sehingga dapat digunakan secara bersama- sama antar SKPD di seluruh Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) memiliki kewenangan atas Dana Desa dengan berbagai integrasi program yang dapat dilakukan dengan program terkait pada SKPD lintas sektor.

Ketika pelaksanaan program, maka masing-masing SKPD akan merujuk pada data yang diperoleh dari Dinas Sosial untuk penerima manfaat. Adanya sentral data ini cukup penting, karena data penerima manfaat setiap tahun akan mengalami perubahan. Dinas

Sosial juga dapat melakukan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik sebagai pusat data yang melakukan sensus dan kolektibilitas data setiap tahun sehingga data yang diperoleh juga update sesuai dengan kebutuhan.

b. Keterkaitan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Dinas ketahanan pangan dapat berfungsi sebagai pusat dari pelaksanaan program di SKPD lain seperti Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Integrasi tersebut dapat dilaksanakan pada program peningkatan kualitas pangan yang dapat dilakukan oleh dinas peternakan, dinas pertanian maupun dinas perikanan. Masing-masing pelaku usaha tersebut akan diberikan pembekalan lanjutan terkait dengan peningkatan produk olahan dari hasil pertanian, perikanan ataupun peternakan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan akan memberikan pembekalan mulai dari sistem pengolahan, pengemasan sampai dengan pemasaran. Apabila diperlukan, maka dapat dilakukan pendampingan sampai dengan perijinan usaha ataupun proses halal MUI. Sehingga disini, produk yang dihasilkan oleh petani, peternak, ataupun nelayan dapat lebih bernilai guna daripada hanya dijual dalam bentuk mentah. Selain memberikan fasilitas berupa lokasi penjualan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dapat memfasilitasi juga untuk penjualan melalui ecommerce atau bekerja sama dengan dinas terkait di tingkat Provinsi untuk mengikuti pameran UKM yang diselenggarakan di tingkat regional maupun nasional.

c. Keterkaitan Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPPA)

Dinas kesehatan memiliki data yang terpusat terkait dengan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan sehingga dapat menjadi pusat dari sebuah program penanggulangan kemiskinan. Dinas kesehatan memberikan kontribusi pada kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan keluarga miskin yang belum tercakup pada pelayanan Jaminan kesehatan nasional (BPJS, KIS atau PBI). Selain itu Dinas kesehatan dapat melakukan koordinasi terkait dengan pelayanan KB masyarakat miskin dengan dinas

pengendalian penduduk dan KB. Kegiatan terkait dapat dilakukan melalui kader kesehatan di tingkat desa ataupun kecamatan melalui Puskesmas.

Program kesehatan yang berhubungan dengan perempuan dan anak dapat dilakukan dinas kesehatan dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, terutama yang berhubungan dengan kesehatan seperti sosialisasi kesehatan reproduksi, perlindungan atas kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan atas kekerasan pada anak ataupun kesehatan mental anak.

d. Keterkaitan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

Dinas Pekerjaan Umum memiliki kegiatan yang hampir sama dengan Dinas perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup sehingga kedua SKPD tersebut dapat melakukan koordinasi terkait permasalahan pemukiman masyarakat miskin. Misalnya untuk program rumah bagi masyarakat miskin dapat diintegrasikan dengan fasilitas pendukung seperti jalan penghubung ataupun kegiatan lain yang berada di ranah Dinas Pekerjaan Umum.

5.5. Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi

Setelah melakukan identifikasi pola integrasi program penanggulangan kemiskinan antar SKPD, tahap terakhir adalah melakukan rencana pelaksanaannya. Tahap awal yang perlu dilakukan adalah tahap sinkronisasi data atau pemutahiran data penerima manfaat. Tahap awal yang perlu dilakukan adalah input data dari keseluruhan data kemiskinan yang telah ada, misalnya data dari TNP2K, BNPT, ataupun data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Pada pelaksanaan kegiatan ini, seluruh SKPD terlibat untuk mengajukan data yang dimiliki untuk dilakukan sinkronisasi sehingga nanti akan memunculkan satu bank data yang dapat mengakomodir keseluruhan kegiatan program penanggulangan kemiskinan.

Tahap berikutnya adalah identifikasi program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang berasal dari pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Identifikasi program eksisting ini penting dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengetahui program apa saja yang telah dilakukan, termasuk pula kendala yang dihadapinya. Dalam identifikasi ini akan diketahui sasaran dari masing-masing program

penanggulangan kemiskinan sehingga apabila pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara membuat sebuah program tidak akan berbenturan dengan program yang saat ini telah dilaksanakan.

Tahap terakhir yang dilakukan adalah evaluasi dari proses pemutakhiran data tersebut sehingga akan diperoleh pusat data penerima manfaat dari program penanggulangan kemiskinan. Pada pemutakhiran data ini akan dilakukan identifikasi apakah penerima manfaat masih layak mendapatkan program kegiatan ataukah sudah mengalami perubahan perekonomian menjadi kategori tidak miskin. Dalam pemutakhiran dan evaluasi ini nanti akan memunculkan identifikasi penerima manfaat *by name by address* dan jenis program kegiatan apakah yang sudah diterimanya sehingga bantuan akan lebih tepat sasaran. Pada pemutakhiran data ini akan diketahui pula kebutuhan dari penerima manfaat, sehingga program yang diberikan akan lebih tepat sasaran dan bermanfaat untuk meningkatkan taraf perekonomiannya. Tahap pemutakhiran data tersebut dapat dirangkum dalam gambar 5.9 berikut ini.



Gambar 5.9 Tahap Pemutakhiran Data

Setelah dilakukan identifikasi data awal sehingga memunculkan pusat data yang terintegrasi, maka dapat dibuat rencana program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi antar SKPD. Berdasarkan pada program penanggulangan kemiskinan di dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017-2022, maka dapat dibuat rencana program sebagai berikut:

Tabel 5.7 Rencana Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Program Existing	Program Integrasi	Indikator Kinerja	SKPD penanggung Jawab
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Program Peningkatan Kualitas produk olahan pangan	Terciptanya produk olahan hasil pertanian, perikanan, peternakan	Dinas Ketahanan pangan Dinas Pertanian Dinas Peternakan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Program Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Program Pra Marital (sebelum pernikahan) bagi remaja dan pasangan muda	Angka perceraian menurun Angka pernikahan pada usia matang Angka kematian ibu dan anak menurun Jarak antar kelahiran tidak terlalu dekat	Dinas Kesehatan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak
Program Dukungan Pelayanan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Pemukiman layak bagi masyarakat miskin	Relokasi pemukiman bantaran sungai Peningkatan rumah layak huni Penyediaan fasilitas sanitasi umum	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan	Program Konsumsi Harian bagi Lansia tanpa keluarga	Jumlah penerima konsumsi	Dinas Kesehatan Dinas Sosial Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Program Bantuan Bencana	Force majeure/bencana alam dapat ditangani dengan baik	BPBD Dinas Sosial Dinas Kesehatan Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup
Program Pelayanan Rastra, PKH dan BPJS Kesehatan	Program Kesehatan antar warga (Pelayanan kesehatan dari rumah ke rumah)	Jumlah angka kematian menurun Jumlah penerima manfaat kesehatan meningkat	Dinas Kesehatan Dinas Sosial Dinas PMD
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pengembangan usaha Bumdes	Bumdes berjalan dengan baik Angka pengangguran menurun Pendapatan masyarakat meningkat	Dinas PMD Dinas Sosial Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Peternakan

Program Pelayanan Raskin	Bantuan Raskin	Jumlah penerima Raskin menurun	Dinas Sosial Bappedalitbang Dinas Pertanian Dinas Ketahanan Pangan
--------------------------	----------------	--------------------------------	---

Tahap akhir yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam membuat program penanggulangan kemiskinan adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi secara menyeluruh sebuah program baru dapat dilaksanakan setelah minimal satu tahun program tersebut dilaksanakan. Sehingga, sangat ideal evaluasi secara menyeluruh dilakukan pada tahun kedua setelah program tersebut terlaksana. Dalam fase monitoring dan evaluasi, program masih tetap berjalan sehingga dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat melakukan konstruksi terhadap program yang dilaksanakan, apakah telah berjalan sesuai ataupun terdapat beberapa tambahan akibat kurang maksimalnya program tersebut.



Gambar 5.10 Tahapan Penanggulangan Kemiskinan

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bukan sebuah tahap yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Hasil dari program ini baru dapat diketahui pada dua sampai tiga tahun berikutnya, sehingga kinerja program bukanlah hasil yang instan. Untuk itulah integrasi program antar SKPD sangat diperlukan agar keberlanjutan pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik, tidak hanya dalam satu waktu tetapi dalam jangka Panjang sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah ikut serta dalam SDG's.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penyusunan Analisis Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan perangkat pedoman kerja pembangunan program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi antar SKPD terkait di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dapat digunakan sebagai pedoman pembangunan dan kebijakan yang baik oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Selain itu dokumen ini dapat digunakan sebagai landasan perencanaan jangka pendek ataupun bahan acuan dalam penyusunan RPJMD yang akan datang.

Program penanggulangan kemiskinan eksisting yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Permasalahan utama yang terjadi adalah data yang belum terintegrasi sehingga mengakibatkan SKPD melakukan kegiatan sesuai dengan data yang diperoleh. Akibatnya adalah *double* penerima manfaat atau bahkan terdapat penerima manfaat yang tidak memperoleh kegiatan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut langkah pertama yang diperlukan adalah melakukan sinkronisasi data penerima manfaat yang telah dimiliki, kemudian menentukan rencana program antar SKPD terkait yang sesuai dan melakukan evaluasi.

6.2 Saran

Saran dalam kajian Analisis Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan dokumen data penerima manfaat secara terpusat yang dapat digunakan sebagai rujukan dari masing-masing SKPD dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan;
2. Diperlukan sebuah pelaksanaan program yang memiliki unsur akuntabilitas, transparan, partisipatif, dan independent sebagai dasar pelaksanaan program penanggulangan

kemiskinan;

3. Pelaksanaan program secara terintegrasi yang dapat dilakukan dua SKPD atau lebih yang mengakomodir kegiatan penanggulangan kemiskinan dari hulu sampai dengan hilir sehingga menghasilkan capaian yang sesuai dengan rencana target kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeleye, B. N., Gershon, O., Ogundipe, A., Owolabi, O., Ogunrinola, I., & Adediran, O. (2020). Comparative investigation of the growth-poverty-inequality trilemma in Sub-Saharan Africa and Latin American and Caribbean Countries. *Heliyon*, 6(12). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05631>
- Alberti, G., Bessa, I., Hardy, K., Trappmann, V., & Umney, C. (2018, June 1). In, *Against and Beyond Precarity: Work in Insecure Times*. Work, Employment and Society. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.1177/0950017018762088>
- Alkire, S. & Fang, Y. (2019). Dynamics of Multidimensional Poverty and Uni-dimensional Income Poverty: An Evidence of Stability Analysis from China. *Social Indicators Research*. 142, 25–64 <https://doi.org/10.1007/s11205-018-1895-2>
- Anser, M. K., Yousaf, Z., Khan, M. A., Nassani, A. A., Alotaibi, S. M., Qazi Abro, M. M., Vo, X. V., & Zaman, K. (2020). Does communicable diseases (including COVID-19) may increase global poverty risk? A cloud on the horizon. *Environmental Research*, 187. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109668>
- Axelrad, H., Malul, M., & Luski, I. (2018). Unemployment among younger and older individuals: does conventional data about unemployment tell us the whole story? *Journal for Labour Market Research*, 52(1). <https://doi.org/10.1186/s12651-018-0237-9>
- Bossler, M., & Broszeit, S. (2017). Do minimum wages increase job satisfaction? Micro-data evidence from the new German minimum wage. *Labour*, 31(4), 480–493. <https://doi.org/10.1111/labr.12117>
- Buddelmeyer, H, McVicar, D, Wooden, M. (2015) Non-standard ‘contingent’ employment and job satisfaction: a panel data analysis. *Industrial Relations: A Journal of Economy and Society* 54(2): 256–275. <https://doi.org/10.1111/irel.12090>
- Burgess, J., & Connell, J. (2020). New technology and work: Exploring the challenges. *Economic and Labour Relations Review*, 31(3), 310–323. <https://doi.org/10.1177/1035304620944296>
- Cebulla, A. & Whetton, S. (2017). All roads leading to Rome? The medium term outcomes of Australian youth’s transition pathways from education. *Journal of Youth Studies* 21, 304-323. <https://doi.org/10.1080/13676261.2017.1373754>
- Dietrich, H., & Möller, J. (2016). Youth unemployment in Europe – business cycle and institutional effects. *International Economics and Economic Policy*, 13(1), 5–25. <https://doi.org/10.1007/s10368-015-0331-1>
- Dosi, G., & Virgillito, M. E. (2019). Whither the evolution of the contemporary social fabric? New technologies and old socio-economic trends. *International Labour Review*, 158(4), 593–625. <https://doi.org/10.1111/ilr.12145>
- Fosu, A. K. (2015). Growth, Inequality and Poverty in Sub-Saharan Africa: Recent Progress in a Global Context. *Oxford Development Studies*, 43(1), 44–59. <https://doi.org/10.1080/13600818.2014.964195>
- Gaponenko, N. V., & Glenn, J. C. (2020). Technology Industry 4.0: Problems of Labor, Employment and Unemployment. *Studies on Russian Economic Development*, 31(3), 271–276. <https://doi.org/10.1134/S1075700720030065>

- Gloede, O., Menkhoff, L., & Waibel, H. (2015). Shocks, Individual Risk Attitude, and Vulnerability to Poverty among Rural Households in Thailand and Vietnam. *World Development*, 71, 54–78. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.11.005>
- Görmüş, A. (2019). Long-Term Youth Unemployment: Evidence from Turkish Household Labour Force Survey. *Indian Journal of Labour Economics*, 62(3), 341–359. <https://doi.org/10.1007/s41027-019-00174-9>
- Green, K. A., Bovell-Ammon, A., & Sandel, M. (2021). Housing and Neighborhoods as Root Causes of Child Poverty. *Academic Pediatrics*, 21(8), S194–S199. <https://doi.org/10.1016/j.acap.2021.08.018>
- Han, P., Zhang, Q., Zhao, Y., & Li, F. Y. (2021). High-resolution remote sensing data can predict household poverty in pastoral areas, Inner Mongolia, China. *Geography and Sustainability*, 2(4), 254–263. <https://doi.org/10.1016/j.geosus.2021.10.002>
- Hassan, M.S., Bukhari, S. & Arshed, N. (2020). Competitiveness, governance and globalization: What matters for poverty alleviation?. *Environment, Development and Sustainability*, 22, 3491– 3518. <https://doi.org/10.1007/s10668-019-00355-y>
- Heckman, J. J., Humphries, J. E., & Veramendi, G. (2018). The Nonmarket Benefits of Education and Ability. *Journal of Human Capital*, 12(2), 282–304. <https://doi.org/10.1086/697535>
- Hirsch-Kreinsen, H. (2016). Digitization of industrial work: development paths and prospects. *Journal for Labour Market Research*, 49(1), 1–14. <https://doi.org/10.1007/s12651-016-0200-6>
- Ho, S. Y. & lyke, B. N. (2018). Finance-growth-poverty nexus: a re-assessment of the trickle-down hypothesis in China. *Economic Change and Restructuring*, 51. <https://doi.org/10.1007/s10644-017-9203-8>
- Hofer, H., Titelbach, G., Winter-Ebmer, R., & Ahammer, A. (2017). Wage Discrimination Against Immigrants in Austria? *Labour*, 31(2), 105–126. <https://doi.org/10.1111/labr.12093>
- Hofmarcher, T. (2021). The effect of education on poverty: A European perspective. *Economics of Education Review*, 83. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2021.102124>
- Ingutia, R., Rezitis, A. N., & Sumelius, J. (2020). Child poverty, status of rural women and education in sub Saharan Africa. *Children and Youth Services Review*, 111. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.104869>
- Iwasaki, I., & Ma, X. (2020). Gender wage gap in China: a large meta-analysis. *Journal for Labour Market Research*, 54(1). <https://doi.org/10.1186/s12651-020-00279-5>
- Jiang, Y., Huang, C., Yin, D., Liang, C., & Wang, Y. (2020). Constructing HLM to examine multi-level poverty-contributing factors of farmer households: Why and how?. *PLoS ONE* 15(1): e0228032. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228032>
- Jiao, W. (2020). Analyzing multidimensional measures of poverty and their influences in China's Qinba Mountains. *Chinese Journal of Population, Resources and Environment*, 18(3), 214–221. <https://doi.org/10.1016/j.cjpre.2021.04.002>

- Kaidi, N., Mensi, S. & Ben Amor, M. (2019). Financial Development, Institutional Quality and Poverty Reduction: Worldwide Evidence. *Social Indicators Research*, 141, 131–156. <https://doi.org/10.1007/s11205-018-1836-0>
- Kim, R., Mohanty, S. K., & Subramanian, S. V. (2016). Multilevel Geographies of Poverty in India. *World Development*, 87, 349–359. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.07.001>
- Krishnamurty, J., & Kumar, A. (2015). The demographic dividend: Challenges to employment and employability. *Indian Journal of Labour Economics*, 58(1), 43–65. <https://doi.org/10.1007/s41027-015-0008-x>
- Kudrna, G., Le, T. & Piggott, J. (2022). Macro-Demographics and Ageing in Emerging Asia: the Case of Indonesia. *Population Ageing* 15, 7–38. <https://doi.org/10.1007/s12062-022-09358-6>
- Lesner, R. V. (2017). Testing for Statistical Discrimination Based on Gender. *LABOUR*, 32(2), 141–181. <https://doi.org/10.1111/labr.12120>
- Liotti, G. (2020). Labour market flexibility, economic crisis and youth unemployment in Italy. *Structural Change and Economic Dynamics*, 54, 150–162. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2020.04.011>
- Liu, S., Hyclak, T. J., & Regmi, K. (2015). Impact of the Minimum Wage on Youth Labor Markets. *LABOUR*, 30(1), 18–37. <https://doi.org/10.1111/labr.12071>
- Liu, Y., Liu, J., & Zhou, Y. (2017). Spatio-temporal patterns of rural poverty in China and targeted poverty alleviation strategies. *Journal of Rural Studies*, 52, 66–75. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.04.002>
- Ma, Z., Chen, X. & Chen, H. (2018). Multi-scale Spatial Patterns and Influencing Factors of Rural Poverty: A Case Study in the Liupan Mountain Region, Gansu Province, China. *Chinese Geographical Science*, 28, 296–312 (2018). <https://doi.org/10.1007/s11769-018-0943-9>
- Mason, A., Lee, R., & Jiang, J. X. (2016). Demographic dividends, human capital, and saving. *Journal of the Economics of Ageing*, 7, 106–122. <https://doi.org/10.1016/j.jeoa.2016.02.004>
- Medeiros, V., Ribeiro, R. S. M., & Amaral, P. V. M. do. (2021). Infrastructure and household poverty in Brazil: A regional approach using multilevel models. *World Development*, 137. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105118>
- Nakara, W.A., Messeghem, K. & Ramarosan, A. (2021). Innovation and entrepreneurship in a context of poverty: a multilevel approach. *Small Business Economics*, 56, 1601–1617 (2021). <https://doi.org/10.1007/s11187-019-00281-3>
- Nieuwenhuis, R., Van Lancker, W., Collado, D. & Cantillon, B. (2020). Trends in Women's Employment and Poverty Rates in OECD Countries: A Kitagawa–Blinder–Oaxaca Decomposition. *Italian Economic Journal*, 6, 37–61 (2020). <https://doi.org/10.1007/s40797-019-00115-x>
- Ozughalu, U.M. & Ogwumike, F.O. (2019). Extreme Energy Poverty Incidence and Determinants in Nigeria: A Multidimensional Approach. *Social Indicators Research*, 142, 997–1014. <https://doi.org/10.1007/s11205-018-1954-8>
- Papadakis, N., Amanaki, E., Drakaki, M., & Saridaki, S. (2020). Employment/ unemployment,

- education and poverty in the Greek Youth, within the EU context. *International Journal of Educational Research*, 99, 101503. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2019.101503>
- Rubery, J, Grimshaw, D, Keizer, A. (2018) Challenges and contradictions in the 'normalising' of precarious work. *Work, Employment and Society* 32(3): 509–527. <https://doi.org/10.1177/0950017017751790>
- Sebastian, N. (2020). Entry into and Escape from Poverty: The Role of Female Labor Supply in Rural India. *The Indian Journal of Labour Economics*. 63, 719–740. <https://doi.org/10.1007/s41027-020-00242-5>
- Silva-Laya, M., D'Angelo, N., García, E., Zúñiga, L., & Fernández, T. (2020, February 1). Urban poverty and education. A systematic literature review. *Educational Research Review*. Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.05.002>
- Vo, T. T. (2018). Household vulnerability as expected poverty in Vietnam. *World Development Perspectives*, 10–12, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2018.04.002>
- Wang, C., Wang, Y., Fang, H., Gao, B., Weng, Z., & Tian, Y. (2020). Determinants of Rural Poverty in Remote Mountains of Southeast China from the Household Perspective. *Social Indicators Research*, 150, 793–810. <https://doi.org/10.1007/s11205-020-02348-1>
- Wang, Y., Jiang, Y., Yin, D., Liang, C., & Duan, F. (2021). Examining Multilevel Poverty- Causing Factors in Poor Villages: a Hierarchical Spatial Regression Model. *Applied Spatial Analysis and Policy*, 14, 969–998. <https://doi.org/10.1007/s12061-021-09388-1>
- Zameer, H., Shahbaz, M., & Vo, X. V. (2020). Reinforcing poverty alleviation efficiency through technological innovation, globalization, and financial development. *Technological Forecasting and Social Change*, 161. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120326>
- Zhou, Y., Guo, Y., Liu, Y., Wu, W., & Li, Y. (2018). Targeted poverty alleviation and land policy innovation: Some practice and policy implications from China. *Land Use Policy*, 74, 53–65. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.04.037>
- Ziegenhain, P. (2021). Getting old before getting rich (and not fully realizing it): Premature ageing and the demographic momentum in Southeast Asia. In A. Goerres & P. Vanhuyse (Eds.), *Global Political Demography : The Politics of Population Change* (p. 169). Palgrave Macmillan.